



**BUKU HASIL PEMETAAN MUTU  
PROGRAM DAN/ATAU SATUAN PAUD DAN DIKMAS TAHUN 2017**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
BALAI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN  
PENDIDIKAN MASYARAKAT BANTEN  
TAHUN 2017**

**BUKU HASIL  
PEMETAAN MUTU  
Program dan/atau Satuan PAUD dan Dikmas**

**Team Penyusun :**

Pengarah : Drs. A. Rasim, M.Si  
Penanggungjawab : Dede Harsudin, SE, M.Si  
Penyusun : Asep Saeful Milah, S.AP, M.Pd  
Layout : Asnawi, SE  
: Jamaludin  
: Asep Saeful Milah, S.AP, M.Pd  
Editor : Dede Harsudin, SE, M.Si



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan berkat, rahmat, dan karunia-Nya sehingga Buku Hasil Pemetaan Mutu Program dan/atau Satuan PAUD dan Dikmas Tahun 2017 dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat beserta salam tercurah kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, beserta Keluarga, Para Sahabat, dan kita sebagai ummat-Nya sampai Yaumul Akhir.

Tujuan dari penyusunan Buku Hasil Pemetaan Mutu ini sebagai bentuk telah terpetakannya Program dan/atau Satuan PAUD dan Dikmas pada wilayah kerja BP PAUD dan Dikmas Banten yakni di Provinsi Banten berdasarkan pada 8 (Delapan) Standar Nasional Pendidikan. Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Banten dalam rangka melaksanakan salah satu tugas utamanya, yaitu pemetaan mutu lembaga satuan pendidikan PAUD dan Dikmas berdasarkan permendikbud no 32 tahun 2017 tentang rincian tugas BP PAUD dan Dikmas dan Permendikbud No 5 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja BP PAUD dan Dikmas.

Pelaksanaan kegiatan Pemetaan Mutu Pendidikan ini ditujukan sebagai upaya untuk mendapatkan informasi relevan yang terkandung dalam data dan menggunakan hasilnya untuk memecahkan suatu masalah tertentu yang kemudian dilakukan rencana tindak lanjut yaitu supervisi yang diharapkan lembaga dapat memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) sehingga dapat terakreditasi.

Buku Hasil Pemetaan Mutu ini diharapkan dapat menjadi pijakan bagi pimpinan dan para jajaran dalam perumusan dan/atau pengambilan kebijakan baik di tingkat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab/Kota, Tingkat UPT Kementerian yang ada di setiap Provinsi khususnya BP PAUD dan Dikmas Banten, dan Tingkat Kementerian melalui Ditjen PAUD dan Dikmas dalam mengambil suatu kebijakan maupun penyelenggaraan program PAUD dan Dikmas di masa yang akan datang.

Buku Hasil Pemetaan Mutu PAUD dan Dikmas Tahun 2017 memiliki gambaran umum hasil pemetaan yang sudah dilakukan pada Lembaga Satuan dan/atau Program PAUD, LKP, dan PKBM. Selain itu disertakan pula capaian mutu program PAUD Dan Dikmas yang meliputi 8 standar nasional pendidikan dari masing-masing pogramnya, yaitu : 1) Standar Isi, 2) Standar Proses, 3) Standar Penilaian, 4) Standar Pembiayaan, 5) Standar Sarana dan Prasarana, 6) Standar Pengelolaan, 7) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dan 8) Standar Kelulusan.

Penghargaan setinggi-tingginya serta ucapan terima kasih kami apresiasi kepada semua pihak yang telah mendukung terlaksananya kegiatan ini dari awal sampai akhir. Kami menyadari bahwa pelaksanaan seluruh kegiatan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat konstruktif sangat diharapkan demi penyempurnaan pelaksanaan program sejenis atau program-program lain di masa yang akan datang.

Akhir kata, semoga Buku Hasil Pemetaan Mutu Program dan/atau Satuan PAUD dan Dikmas Tahun 2017 ini dapat bermanfaat khususnya bagi para pemegang kebijakan, akademisi dan praktisi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat serta para pembaca.

Serang, Oktober 2017  
Kepala

**Drs. A. Rasim, M.Si**  
NIP. 196309051998031003

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Dasar Hukum .....	3
C. Pengertian .....	3
D. Ruang Lingkup .....	3
E. Tujuan .....	4
F. Hasil yang Diharapkan .....	4
G. Manfaat .....	4
<b>BAB II KEBIJAKAN PEMETAAN MUTU PAUD DAN DIKMAS</b> .....	6
A. Jangkauan Layanan PAUD dan Dikmas .....	6
B. Wilayah Kerja .....	7
C. Mutu Layanan PAUD dan Dikmas .....	19
D. Metode Pengukuran Capaian Mutu .....	20
E. Lembaga Satuan PAUD dan Dikmas Sasaran Pemetaan Mutu .....	21
<b>BAB III CAPAIAN MUTU PAUD DAN DIKMAS TAHUN 2017</b> .....	29
A. Capaian Mutu Lembaga Satuan PAUD dan Dikmas Se Provinsi Banten .....	30
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	47
A. Kesimpulan .....	47
B. Saran .....	47
<b>Lampiran-Lampiran</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Peningkatan mutu pendidikan merupakan komitmen Pemerintah Republik Indonesia yang diterapkan melalui berbagai peraturan perundang-undangan terkait Sistem Pendidikan Nasional. Salah satu kebijakan yang telah diambil adalah ditertibkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas PP No 19 Th 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagai upaya penjabaran Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. PP No. 32 tahun 2013 tersebut mengatur tentang kriteria minimal mutu sebagai acuan penyelenggaraan pendidikan yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 menguraikan delapan standar dalam pendidikan, yakni : 1) *standar kompetensi lulusan*, 2) *standar isi*, 3) *standar proses*, 4) *standar pendidik dan tenaga kependidikan*, 5) *standar sarana dan prasarana*, 6) *standar pengelolaan*, 7) *standar pembiayaan pendidikan*, dan 8) *standar penilaian pendidikan*.

Standar nasional pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Standar tersebut kemudian dijabarkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) termasuk diantaranya untuk garapan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal (PAUDNI). Sementara pendidikan masyarakat (Dikmas) belum ada peraturan menteri tentang standar mutunya, akan tetapi agar tidak terlihat rancu mengenai penafsiran tersebut Pendidikan Masyarakat (Dikmas, tetap mengacu pada Pendidikan Nonformal.

Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini, dan Pendidikan Masyarakat (BP- PAUD dan Dikmas) Banten adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat yang terbentuk berdasarkan Undang Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang diperkuat dengan Permendikbud No 5 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja BP PAUD dan Dikmas dan dipertajam dengan permendikbud no 32 tahun 2017 tentang Rincian Tugas BP PAUD dan Dikmas.

BP PAUD dan Dikmas Banten dengan wilayah kerja meliputi 8 (Delapan) Kab/Kota Se Provinsi Banten yang terdiri dari : 1) Kab. Pandeglang, 2) Kab. Lebak, 3) Kab. Serang, 4) Kab. Tangerang, 5) Kota Serang, 6) Kota Cilegon, 7) Kota Tangerang, dan 8) Kota Tangerang Selatan. Adapun untuk Provinsi Banten sendiri sebelum diimplementasikannya UU no 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan wilayah kerja dari PP PAUDNI Jaya Giri Jawa Barat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 5 Tahun 2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat pada tanggal 03 Februari 2017, BP-PAUD dan Dikmas Banten

mempunyai fungsi yaitu : 1) *Pemetaan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat*, 2) *Pengembangan Model di bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat*, 3) *Supervisi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat*, 4) *Fasilitasi Penyusunan Dan Pelaksanaan Program Serta Pengembangan Sumber Daya Di Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Masyarakat*, 5) *Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Informasi Di Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat*, 6) *Pelaksanaan Kemitraan Di Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat*, dan 7) *Pelaksanaan Urusan Administrasi*.

Salah satu tugas dan fungsi BP-PAUD dan Dikmas adalah melakukan Pemetaan Mutu Lembaga Satuan dan/atau Program PAUD dan Dikmas. Berdasarkan tugas dan fungsi tersebut BP-PAUD dan Dikmas Banten melaksanakan kegiatan tersebut dengan melibatkan berbagai unsur yang berkompeten di dalamnya yang terdiri dari : 1) Unsur Dinas Pendidikan, 2) Unsur Pokja Akreditasi, 3) Unsur Penilik, 4) Unsur Pamong Belajar SKB, dan 5) Unsur Ormit PAUD dan Dikmas Lainnya.

Dari pelaksanaan pemetaan mutu PAUD Dan Dikmas ini diharapkan akan dapat meningkatkan mutu program PAUD Dan Dikmas, baik secara administrasi maupun secara substansi sehingga dapat mencapai standar nasional pendidikan melalui supervisi dan akreditasi.

Laporan Pemetaan Mutu Lembaga Satuan dan/atau Program PAUD dan Dikmas ini memuat sejauh mana 8 (Delapan) Standar Nasional Pendidikan yang ditetapkan dilaksanakan oleh Lembaga satuan yang diverifikasi oleh tim atas dasar usulan masing-masing Dinas Pendidikan Kab/Kota Se Provinsi Banten.

Lembaga Satuan PAUD dan Dikmas yang menjadi sasaran pemetaan mutu terdiri dari beberapa kriteria diantaranya : 1) terdaftar dalam Aplikasi Dapodik/Aplikasi Pemetaan Mutu, 2) memiliki NPSN, 3) Belum terakreditasi, dan 4) Diusulkan atas dasar kebutuhan dari masing-masing Dinas Pendidikan Kab/Kota.

Dalam implementasinya di lapangan, lembaga satuan pendidikan perlu melengkapi instrument manual yang dapat menjadi landasan kerja operasional khususnya untuk tim verifikator dalam melakukan verifikasi itu sendiri.

Laporan Analisis Pemetaan Mutu Lembaga Satuan dan/atau Program Pendidikan Anak Usia Dini, dan Pendidikan Masyarakat ini akan menjadi dasar dalam penyusunan sebuah Buku Hasil Pemetaan Mutu, dan landasan untuk melaksanakan kegiatan Supervisi, disamping pengambilan dan perumusan kebijakan sebagaimana dimaksud sebelumnya.

Dalam laporan ini kami berharap kedepannya Lembaga yang telah mengikuti kegiatan pemetaan mutu, supervisi, dan melanjutkannya untuk mengikuti akreditasi dapat menjadi skala prioritas kaitan dengan kebijakan-kebijakan Ditjen PAUD dan Dikmas kedepannya, sehingga lembaga satuan lainnya dapat mengikuti dan berbondong bondong untuk meningkatkan mutu lembaganya masing-masing.



Dalam laporan ini kami berharap kedepannya Lembaga yang telah mengikuti kegiatan pemetaan mutu, supervisi, dan melanjutkannya untuk mengikuti akreditasi dapat menjadi skala prioritas kaitan dengan kebijakan-kebijakan Ditjen PAUD dan Dikmas kedepannya, sehingga lembaga satuan lainnya dapat mengikuti dan berbondong bondong untuk meningkatkan mutu lembaganya masing-masing.

## B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pemanfaatan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas PP No 19 Th 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
7. Perdirjen PAUD dan Dikmas No 2 tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemetaan Mutu program dan/atau Satuan PAUD dan Dikmas
8. DIPA BP-PAUD Dan Dikmas Banten Tahun anggaran 2017

## C. Pengertian

Pemetaan Mutu adalah serangkaian kegiatan untuk mengetahui kondisi dan situasi yang menggambarkan peta mutu pendidikan Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang dilakukan oleh satuan pendidikan, penyelenggara, pemerintah daerah, dan pemerintah dalam kurun waktu tertentu.

Pemetaan mutu PAUD dan Dikmas yang dimaksud saat ini adalah suatu kegiatan atau proses memetakan mutu program PAUD dan Dikmas yang diselenggarakan oleh BP PAUD dan Dikmas Banten dan dilaksanakan oleh Lembaga satuan PAUD dan Dikmas (PAUD, PKBM, LKP) dan diverifikasi oleh Tim Verifikator yang ditunjuk dan diusulkan oleh masing-masing Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab/Kota yang berada di wilayah kerja masing-masing se Provinsi Banten.

Pemetaan mutu PAUD dan Dikmas berkaitan dengan program PAUD, Dikmas (LKP & PKBM) dengan menggunakan instrumen pemetaan mutu yang memuat 8 (delapan) standar mutu : 1) standar lulusan, 2) standar isi, 3) standar proses, 4) standar penilaian, 5) standar sarana prasarana, 6) standar pengelolaan, 7) standar pembiayaan, 8) serta standar pendidik dan tenaga kependidikan.

Pemetaan mutu PAUD dan Dikmas berkaitan dengan program PAUD, Dikmas (LKP & PKBM) dengan menggunakan instrumen pemetaan mutu yang memuat 8 (delapan) standar mutu : 1) standar lulusan, 2) standar isi, 3) standar proses, 4) standar penilaian, 5) standar sarana prasarana, 6) standar pengelolaan, 7) standar pembiayaan, 8) serta standar pendidik dan tenaga kependidikan.

#### D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam kegiatan pemetaan mutu ini adalah memetakan mutu program PAUD dan Dikmas yang berkaitan dengan program PAUD, PKBM dan LKP yang dilaksanakan oleh Satuan PAUD dan Dikmas di wilayah kerja BP PAUD dan Dikmas Banten yang dilakukan pada periode 1 tahun 2017, dan berdasar pada 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan (SNP).

#### E. Tujuan

Tujuan dari penyusunan laporan Pemetaan Mutu PAUD dan Dikmas ini adalah sebagai berikut :

1. Memberikan gambaran pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh satuan PAUD dan Dikmas di wilayah kerja BP PAUD dan Dikmas Banten yakni di Provinsi Banten;
2. Sebagai bahan masukan bagi Ditjen PAUD dan Dikmas serta UPT kementerian Pendidikan dan Kebudayaan BP-PAUD dan Dikmas Banten dalam mengambil kebijakan mengenai pengembangan program dan penyaluran bantuan pemerintah bagi PAUD dan Dikmas di masa yang akan datang;
3. Sebagai bahan masukan bagi Dinas Pendidikan Kab/Kota Se Provinsi Banten dalam mengambil kebijakan dan keputusan mengenai pengembangan dan penyelenggaraan serta pengambilan keputusan dalam rangka penyaluran bantuan pemerintah pada program PAUD dan Dikmas di masing-masing kab/kota di masa yang akan datang.

#### F. Hasil yang Diharapkan

Hasil yang diharapkan dari penyusunan laporan Analisis Pemetaan Mutu PAUD dan Dikmas tahun 2017 adalah:

1. Tersedianya informasi mengenai mutu program PAUD dan Dikmas dari lembaga satuan sesuai dengan delapan (8) Standar Nasional Pendidikan;
2. Adanya informasi bagi Ditjen PAUD dan Dikmas untuk bahan pengambilan kebijakan;
3. Adanya informasi bagi pemangku kepentingan di BP-PAUD dan Dikmas Banten dalam mengambil kebijakan mengenai pengembangan program PAUD dan Dikmas di masa yang akan datang;

4. Adanya informasi bagi pemangku kepentingan di BP-PAUD dan Dikmas Banten dalam mengambil kebijakan mengenai pengembangan program PAUD dan Dikmas di masa yang akan datang;
5. Adanya informasi bagi pemangku kepentingan di Dinas Pendidikan Kab/Kota Se Provinsi Banten dalam mengambil kebijakan mengenai pengembangan dan penyelenggaraan program PAUD dan Dikmas di wilayah kerjanya pada masa yang akan datang.

#### G. Manfaat

Manfaat dari pemetaan mutu PAUD dan Dikmas adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program PAUD dan Dikmas yang dilaksanakan oleh satuan PAUD dan Dikmas di wilayah kerja BP PAUD dan Dikmas Banten. Selain itu data hasil pemetaan mutu program PAUD dan Dikmas ini dapat dimanfaatkan antara lain sebagai dasar dalam kebijakan sebagai berikut:

1. Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) untuk peserta didik PAUD;
2. Bantuan Operasional Kesetaraan (BOK) untuk Peserta Didik Paket A, B, dan C di PKBM;
3. Bantuan Pemerintah terkait Program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) dan Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW) bagi Lembaga Kursus dan Pelatihan;
4. Tunjangan pendidik dan insentif PTK PAUD dan Dikmas;
5. Sertifikasi pendidik PAUD dan Dikmas;
6. Akreditasi Lembaga dan program-program PAUD dan Dikmas;
7. Revitalisasi sarana dan prasarana lembaga satuan PAUD dan Dikmas;
8. Pengembangan Program PAUD dan Dikmas lainnya.

## **BAB II**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Jangkauan Layanan**

Layanan Program PAUD dan Dikmas diarahkan untuk dapat terus mendorong meningkatkan akses, pemerataan dan keterjangkauan layanan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat dengan lebih memperhatikan pemenuhan standar, mutu, dan relevansi layanan. Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat diharapkan dapat memberikan kesempatan yang lebih luas, terbuka, merata dan bermutu bagi seluruh lapisan masyarakat untuk belajar dan memberdayakan diri melalui layanan pendidikan anak usia dini, layanan pendidikan masyarakat, layanan Kursus dan pelatihan yang didukung dengan penyediaan dan peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan PAUD dan Dikmas.

Jangkauan Layanan PAUD dan Dikmas terdiri dari : 1) Pendidikan Anak Usia Dini, antara lain: a. Pembelajaran dan Peserta Didik: Peningkatan Kapasitas Pembelajaran di Gugus TK, Peningkatan kompetensi pengelola dan pendidik PAUD, Peningkatan Penyelenggaraan PAUD Percontohan tingkat Kecamatan/Desa, Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) untuk peserta didik PAUD, BOP TK dan KB. b. Kelembagaan dan Kemitraan: Rintisan Taman Penitipan Anak (TPA), Rintisan Program Kelompok Bermain dan Taman Kanak Kanak, Rintisan Program Satuan PAUD Sejenis (SPS), Penyelenggaraan PAUD Daerah Terpencil Dan Perbatasan, Penyelenggaraan PAUD Berbasis Keluarga (Parenting). Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) dalam bentuk Festival tentang Kreativitas Anak di tingkat Kabupaten dan Provinsi, Kerjasama dengan organisasi mitra PAUD. c. Sarana dan Prasarana: Penyediaan APE PAUD, Penyediaan Bahan Belajar Anak dan Tutor PAUD, Bantuan Alat dan Kegiatan Pembelajaran Program PAUD tanggap Darurat Pasca Bencana, Pembangunan Unit Gedung Baru (UGB) TK Pembina Kecamatan/Kabupaten, Pembangunan Ruang Kelas Baru dan meubelair TK, Pembangunan PAUD Terpadu, Pembangunan TK, Rehabilitasi TK, Sarana Pembelajaran dan Alat Bermain/Peraga TK. 2) Layanan Pendidikan Masyarakat a. Pendidikan Keaksaraan: Keaksaraan Dasar, Keaksaraan Usaha Mandiri, Keaksaraan Komunitas Khusus (termasuk Keaksaraan Bencana, Inovasi Aksara Agar Berdaya, Keaksaraan Seni Budaya Lokal, Aksara Kewirausahaan). b. Pendidikan Pemberdayaan Perempuan: Pendidikan Kecakapan Hidup Berorientasi Pemberdayaan Perempuan, Peningkatan Budaya Tulis Melalui Koran Ibu dan Koran Anak, Pembelajaran Pendidikan Perempuan untuk Pembangunan Berkelanjutan, Pendidikan Kecakapan Keorngtuaan dan Perlindungan Anak Marjinal, Pencegahan Perdagangan Orang.

c. Pengembangan Budaya Baca melalui TBM Penguatan Keaksaraan, TBM Penguatan Minat Baca, TBM Keliling, dan TBM di ruang publik. d. Pengarusutamaan Gender dan Anak melalui penguatan pokja gender dan keluarga berwawasan gender. e. Pendampingan PKBM, Rumah Pintar dan Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis. 3) Layanan Kursus dan Pelatihan terdiri atas: a. Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) b. Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW) c. Desa Vokasi d. Bantuan Lembaga Sertifikasi Kompetensi e. Tempat Uji Kompetensi f. Pelaksanaan Uji Kompetensi g. Penyelenggaraan Lomba-lomba Kursus dan Pelatihan h. Biaya Operasional Penyelenggaraan LKP dan revitalisasi LKP i. Revitalisasi LKP j. Pusat Kursus dan Pelatihan Masyarakat k. Penyediaan dan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Dikmas meliputi : a) Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan PAUD dan Dikmas melalui peningkatan kualifikasi dan kompetensi. b) Peningkatan mutu pendidikan kepramukaan melalui pelatihan Pembina gugus depan dan pelatih pramuka serta jambore.

## B. Wilayah Kerja



*Gambar 1. Peta Provinsi Banten*

Banten adalah sebuah provinsi di Tatar Pasundan, wilayah paling barat di Pulau Jawa, Indonesia. Provinsi ini pernah menjadi bagian dari Provinsi Jawa Barat, namun menjadi wilayah pemekaran sejak tahun 2000, dengan keputusan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000. Pusat pemerintahannya berada di Kota Serang.

Wilayah Banten terletak di antara 5°7'50"-7°1'11" Lintang Selatan dan 105°1'11"-106°7'12" Bujur Timur, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2000 luas wilayah Banten adalah 9.160,70 km<sup>2</sup>. Provinsi Banten terdiri dari 4 kota, 4 kabupaten, 154 kecamatan, 262 kelurahan, dan 1.273 desa.

Wilayah laut Banten merupakan salah satu jalur laut potensial, Selat Sunda merupakan salah satu jalur lalu lintas laut yang strategis karena dapat dilalui kapal besar yang menghubungkan Australia dan Selandia Baru dengan kawasan Asia Tenggara misalnya Thailand, Malaysia, dan Singapura.

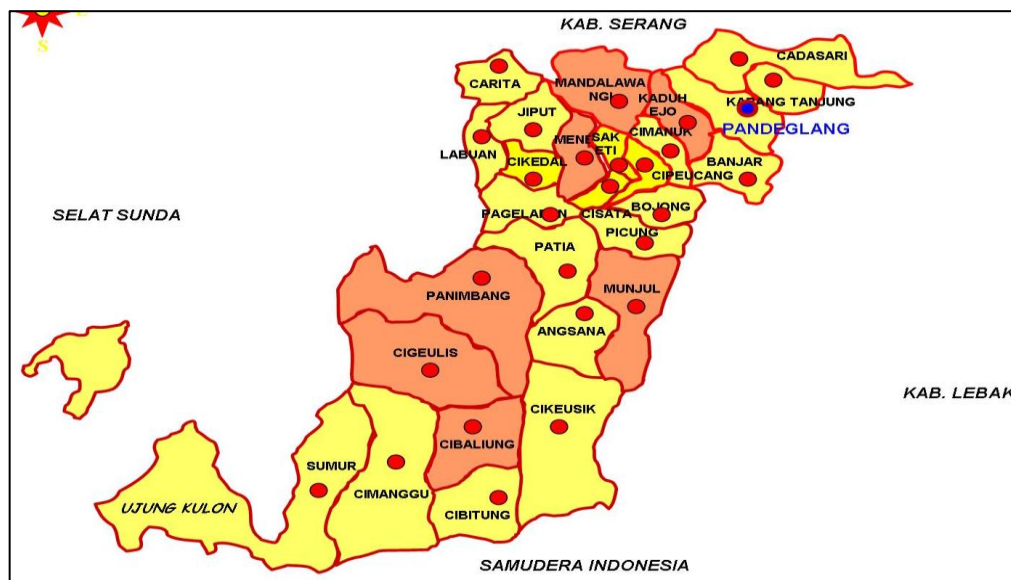
Di samping itu Banten merupakan jalur penghubung antara Jawa dan Sumatera. Bila dikaitkan posisi geografis, dan pemerintahan maka wilayah Banten terutama daerah Tangerang raya (Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan) merupakan wilayah penyangga bagi Jakarta. Secara ekonomi wilayah Banten memiliki banyak industri. Wilayah Provinsi Banten juga memiliki beberapa pelabuhan laut yang dikembangkan sebagai antisipasi untuk menampung kelebihan kapasitas dari pelabuhan laut di Jakarta, dan ditujukan untuk menjadi pelabuhan alternatif selain Singapura.

Tabel 1. Batas wilayah

Utara	Laut Jawa
Selatan	Samudera Indonesia
Barat	Selat Sunda
Timur	Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Jawa Barat

Wilayah Kerja BP PAUD dan Dikmas Banten terdiri dari Kab/Kota Se Provinsi Banten meliputi :

1. Kabupaten Pandeglang



Gambar 2. Peta Kabupaten Pandeglang

Kabupaten Pandeglang adalah sebuah kabupaten di Provinsi Banten, Indonesia. Ibukotanya adalah Pandeglang. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Serang di utara, Kabupaten Lebak di Timur, serta Samudra Indonesia di barat dan selatan. Wilayahnya juga mencakup Pulau Panaitan (di sebelah barat, dipisahkan dengan Selat Panaitan), serta sejumlah pulau-pulau kecil di Samudra Hindia, termasuk Pulau Deli dan Pulau Tinjil. Semenanjung Ujung Kulon merupakan ujung paling barat Pulau Jawa, di mana terdapat suaka margasatwa tempat perlindungan hewan badak bercula satu yang kini hampir punah.

Pusat perekonomian Kabupaten Pandeglang terletak di dua kota yakni Kota Pandeglang dan Labuan. Sebagian besar wilayah Kabupaten Pandeglang merupakan dataran rendah dan dataran bergelombang. Kawasan selatan terdapat rangkaian pegunungan. Sungai yang mengalir di antaranya Sungai Ciliman yang mengalir ke arah barat, dan Sungai Cibaliung yang mengalir ke arah selatan. Kecamatan dengan penduduk terbanyak adalah Kecamatan Labuan disusul Kecamatan Cikeusik dan Kecamatan Panimbang.

Tabel 2. Kondisi Demografi Kabupaten Pandeglang

<b>Kecamatan</b>	<b>Wilayah (km<sup>2</sup>)</b>	<b>Populasi</b>	<b>Kepadatan (/km<sup>2</sup>)</b>
Sumur	258,54	21.813	84
Cimanggu	259,73	37.121	143
Cibaliung	221,88	26.033	177
Cibitung	180,72	19.903	110
Cikeusik	322,76	49.647	154
Cigeulis	176,21	27.724	189
Panimbang	132,84	46.686	351
Sobang	138,88	37.735	272
Munjul	75,25	22.836	303
Angsana	64,84	27.124	418
Sindangresmi	65,20	21.527	330
Picung	56,74	34.023	600
Bojong	50,72	33.804	666
Saketi	54,13	40.465	748
Cisata	32,65	22.150	678
Pagelaran	42,76	33.882	792
Patia	45,48	27.612	607



Sukaresmi	57,30	33.674	588
Labuan	15,66	51.903	3.314
Carita	41,87	32.086	766
Jiput	53,04	29.795	562
Cikedal	26,00	30.721	1.182
Menes	22,41	35.692	1.593
Pulosari	31,33	26.599	849
Mandalawangi	80,19	44.910	560
Cimanuk	23,64	37.745	1.597
Cipeucang	21,16	28.107	1.328
Banjar	30,50	30.463	999
Kaduhejo	33,57	33.880	1.009
Mekarjaya	31,34	20.769	663
Pandeglang	16,85	38.590	2.290
Majasari	19,57	42.153	2.154
Cadasari	26,20	30.936	1.181
Karang Tanjung	19,07	29.799	1.563
Koroncong	17,86	17.069	956
<b>Kabupaten Pandeglang</b>	<b>2.746,89</b>	<b>1.130.514</b>	<b>412</b>

Keterangan : Berdasarkan Sensus Penduduk Di Bulan Mei 2010 Jumlah Penduduk Pandeglang : 1.145.792 Orang.

## 2. Kab. Lebak



Gambar 3. Peta Kabupaten Lebak



Kabupaten Lebak adalah sebuah kabupaten di Provinsi Banten, Indonesia. Ibukotanya adalah Rangkasbitung. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Serang dan Kabupaten Tangerang di utara, Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi di timur, Samudra Hindia di selatan, serta Kabupaten Pandeglang di barat.

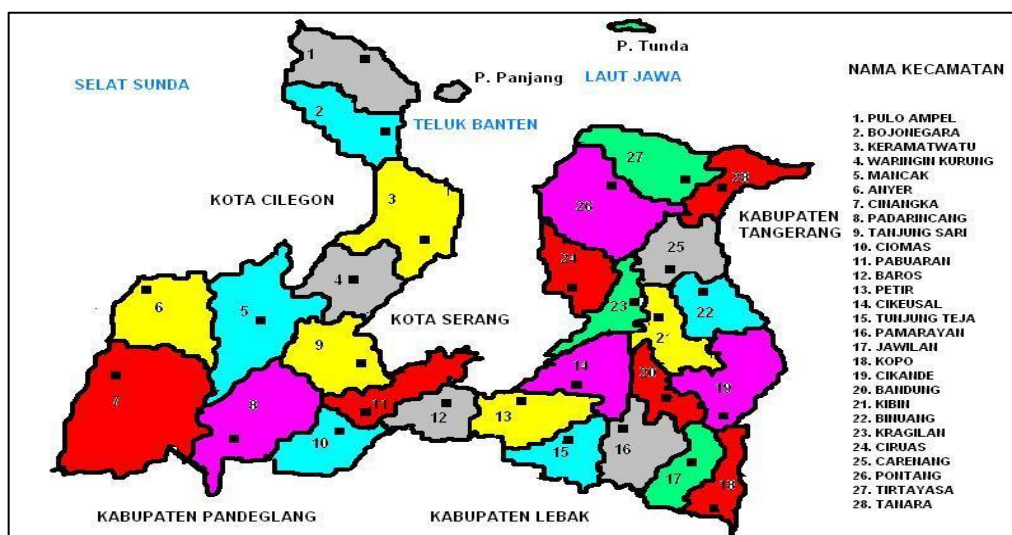
Kabupaten Lebak terdiri atas 28 kecamatan, yang dibagi lagi atas 340 desa dan 5 kelurahan. Pusat pemerintahan di Kecamatan Rangkasbitung, yang berada di bagian utara wilayah kabupaten. Kota ini dilintasi jalur kereta api Jakarta-Merak.

Secara geografis wilayah Kabupaten Lebak berada pada 105 25' - 106 30 BT dan 6 18' - 7 00' LS. Bagian utara kabupaten ini berupa dataran rendah, sedang di bagian selatan merupakan pegunungan, dengan puncaknya Gunung Halimun di ujung tenggara, yakni di perbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi. Sungai Ciujung mengalir ke arah utara, merupakan sungai terpanjang di Banten.

Baduy merupakan salah satu objek wisata yang dimiliki Kabupaten Lebak dan sering dikunjungi wisatawan mancanegara karena memiliki keunikan tersendiri.

Kabupaten Lebak Terbagi atas 28 Kecamatan, yaitu : 1) Banjarsari, 2) Bayah, 3) Bojongmanik, 4) Cibadak, 5) Cibeber, 6) Cigemblong, 7)Cihara, 8) Cijaku, 9) Cikulur, 10) Cileles, 11) Cilograng, 12) Cimarga, 13) Cipanas, 14) Cirinten, 15) Curugbitung, 16) Gunung kencana, 17) Kalang Anyar, 18) Lebak Gedong, 19) Leuwidamar, 20) Maja, 21) Malingping, 22) Muncang, 23) Panggarangan, 24) Rangkasbitung, 25) Sajira, 26) Sobang, 27) Wanasalam, 28) Warung gunung.

### 3. Kab. Serang



Gambar 4. Peta Kabupaten Serang

Kabupaten Serang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Banten. Ibukotanya adalah Ciruas namun saat ini pusat pemerintahannya masih berada di Kota Serang. Kabupaten ini berada di ujung barat laut Pulau Jawa, berbatasan dengan Laut Jawa, dan Kota Serang di utara, Kabupaten Tangerang di timur, Kabupaten Lebak di selatan, serta Kota Cilegon di barat.

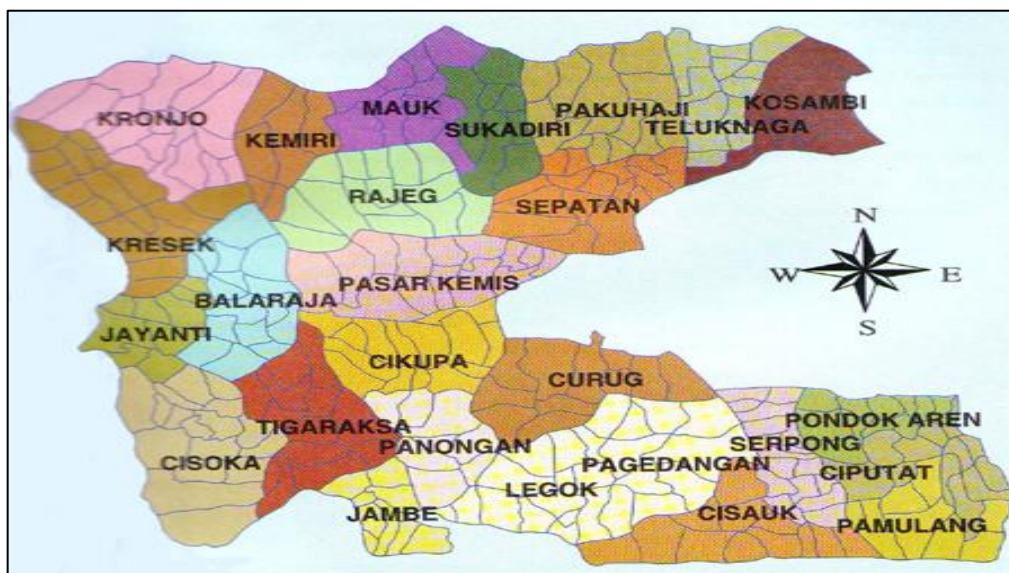
Geografi Luas wilayah Kabupaten Serang adalah 1.467,35 km<sup>2</sup>. Secara geografis terletak posisi koordinat antara 105°7' - 105°22' Bujur Timur dan 5°50' - 6°21' Lintang Selatan. Sebelah utara : berbatasan dengan Laut Jawa Sebelah selatan : berbatasan dengan Kabupaten Lebak dan Pandeglang Sebelah barat : berbatasan dengan Kota Cilegon dan Selat Sunda Sebelah : berbatasan dengan Kabupaten Tangerang Secara topografi, Kabupaten Serang merupakan wilayah dataran rendah dan pegunungan dengan ketinggian antara 0 sampai 1.778 m di atas permukaan laut. Fisiografi Kabupaten Serang dari arah utara ke selatan terdiri dari wilayah rawa pasang surut, rawa musiman, dataran, perbukitan dan pegunungan. Bagian utara merupakan wilayah yang datar dan tersebar luas sampai ke pantai, kecuali sekitar Gunung Sawi, Gunung Terbang dan Gunung Batusipat. Dibagian selatan sampai ke barat, Kabupaten Serang berbukit dan bergunung antara lain sekitar Gunung Kencana, Gurung Karang dan Gunung Gede.

Daerah yang bergelombang tersebar di antara kedua bentuk wilayah tersebut. Hampir seluruh daratan Kabupaten Serang merupakan daerah subur karena tanahnya sebagian besar tertutup oleh tanah endapan Alluvial dan batu vulkanis kuarter. Potensi tersebut ditambah banyak terdapat pula sungai-sungai yang besar dan penting yaitu Sungai Ciujung, Cidurian, Cibanten, Cipaseuran, Cipasang dan Anyar yang mendukung kesuburan daerah-daerah pertanian di Kabupaten Serang. I K L I M Iklim di wilayah Kabupaten Serang termasuk tropis dengan musim hujan antara November – April dan musim kemarau antara Mei – Oktober. Curah hujan rata-rata 3,92 mm/hari. Temperatur udara rata-rata berkisar antara 25,8° Celsius – 27,6° Celsius. Temperatur udara minimum 20,90° Celsius dan maksimum 33,8° Celsius. Tekanan udara dan kelembaban nisbi rata-rata 81,00 mb/bulan. Kecepatan arah angin rata-rata 2,80 knot, dengan arah terbanyak adalah dari barat.

Kabupaten Serang terdiri atas 29 kecamatan, yaitu Anyar, Kecamatan bandung, Baros, Binuang, Bojonegara, Carenang, Kecamatan Cikande, Cikeusal, Cinangka, Ciomas, Ciruas, Gunungsari, Jawilan, Kibin, Kopo, Kragilan, Kramatwatu, Lebakwangi, Mancak, Pabuaran, Padarincang, Pamarayan, Petir, Pontang, Pulo Ampel, Tanara, Tirtayasa, Tunjung Teja, Lebak Wangi dan Waringin Kurung, yang dibagi lagi atas sejumlah desa. Pusat pemerintahan berada di Kecamatan Ciruas. Namun aktivitas administratif masih terdapat di kota serang karena masih proses pemindahan

Pada tanggal 17 Juli 2007 Kabupaten Serang dimekarkan menjadi Kota Serang dan Kabupaten Serang.

#### 4. Kab. Tangerang



*Gambar 5. Peta Kabupaten Tangerang*

Kabupaten Tangerang adalah kabupaten yang berada di wilayah Tatar Pasundan, Provinsi Banten, Indonesia. Ibukotanya adalah Tigaraksa. Kabupaten ini terletak tepat di sebelah barat Jakarta.

Wilayah Kabupaten Tangerang berbatasan dengan: {{Batas USBT | utara=Laut Jawa | selatan=[[Kabupaten Lebak, Kabupaten Bogor | timur= [[Kota Tangerang Kota Tangerang Selatan, Kota Administrasi Jakarta Utara|barat=Kabupaten Serang }}.

Sebagian besar wilayah Tangerang merupakan dataran rendah. Sungai Cisadane merupakan sungai terpanjang di Tangerang yang mengalir dari selatan dan bermuara di Laut Jawa. Tangerang merupakan wilayah perkembangan Jakarta. Secara umum, Kabupaten Tangerang dapat dikelompokkan menjadi 3 wilayah pertumbuhan, yakni:

- Pusat Pertumbuhan Balaraja dan Tigaraksa, berada di bagian barat, difokuskan sebagai daerah sentra industri, permukiman, dan pusat pemerintahan.
- Pusat Pertumbuhan Teluknaga, berada di wilayah pesisir, mengedepankan industri pariwisata alam dan bahari, industri maritim, perikanan, pertambakan, dan pelabuhan.
- Pusat Pertumbuhan Curug, Kelapa Dua, Legok dan Pagedangan, berada di bagian timur dekat perbatasan dengan Kota Tangerang Selatan, difokuskan sebagai pusat pemukiman, dan kawasan bisnis.

Kabupaten Tangerang terdiri atas 29 kecamatan, yang dibagi lagi atas sejumlah 246 desa dan 28 kelurahan. Pusat pemerintahan berada di Kecamatan Tigaraksa.

Kabupaten Tangerang terbagi menjadi 29 kecamatan, yaitu: 1) Balaraja, 2) Cikupa, 3) Cisauk, 4) Cisoka, 5) Curug, 6) Gunung kaler, 7) Jambe, 8) Jayanti, 9) Kelapa Dua, 10) Kemiri, 11) Kosambi, 12) Kresek, 13) Kronjo, 14) Legok, 15) Mauk, 16) Mekarbaru, 17) Pagedangan, 18) Pakuhaji, 19) Panongan, 20) Pasar kemis, 21) Rajeg, 22) Sepatan, 23) Sepatan Timur, 24) Sindang Jaya, 25) Solear, 26) Sukadiri, 27) Sukamulya, 28) Teluk naga, 29) Tigaraksa.

## 5. Kota Serang



Gambar 6. Peta Kota Serang

Kota Serang adalah ibu kota Provinsi Banten, Indonesia. Kota ini berada di bagian utara Provinsi Banten, serta dikelilingi oleh Kabupaten Serang.

Kota Serang terdiri atas 6 kecamatan, yang dibagi lagi atas sejumlah kelurahan. Dahulu Serang merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Serang, kemudian ditetapkan sebagai kota otonom pada tanggal 2 November 2007.

Kota Serang terdiri atas :

- Serang, Cipocok Jaya, Curug, Kasemen, Taktakan, Walantaka

Tabel 3. Data Demografi Kota Serang

Demografi		
• Suku bangsa	Banten	44%
	Sunda	25%
	Jawa	22%
	Batak	6%
	Betawi	2%
	Bugis	1%
• Agama	Islam	89.23%
	Kristen	3.77%
	Katolik	4.84%
	Buddha	1.89%<
	Hindu	0.23%
	Konghucu	0,04%
• Bahasa	Indonesia, Sunda, Jawa Banten	



## 6. Kota Cilegon



*Gambar 7. Peta Kota Cilegon*

Kota cilegon adalah sebuah kota di Provinsi Banten, Indonesia. Cilegon berada di ujung barat laut pulau Jawa, di tepi Selat Sunda. Kota Cilegon dikenal sebagai kota industri. Sebutan lain bagi Kota Cilegon adalah Kota Baja mengingat kota ini merupakan penghasil baja terbesar di Asia Tenggara karena sekitar 6 juta ton baja dihasilkan tiap tahunnya di Kawasan Industri Krakatau Steel, Cilegon. Di Kota Cilegon terdapat berbagai macam objek vital negara antara lain Pelabuhan Merak, Pelabuhan Cigading Habeam Centre, Kawasan Industri Krakatau Steel, PLTU Suralaya, PLTU Krakatau Daya Listrik, Krakatau Tirta Industri Water Treatment Plant, (Rencana Lot) Pembangunan Jembatan Selat Sunda dan (Rencana Lot) Kawasan Industri Berikat Selat Sunda.

Berdasarkan letak geografisnya, Kota Cilegon berada dibagian paling ujung sebelah Barat Pulau Jawa dan terletak pada posisi :  $5^{\circ}52'24''$  -  $6^{\circ}04'07''$  Lintang Selatan (LS),  $105^{\circ}54'05''$  -  $106^{\circ}05'11''$  Bujur Timur (BT)<sup>[3]</sup>. Secara administratif wilayah berdasarkan UU No.15 Tahun 1999 tentang terbentuknya Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon pada tanggal 27 April 1999, Kota Cilegon mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara: berbatasan dengan Kecamatan Bojonegara (Kabupaten Serang)
- Sebelah Barat: berbatasan dengan Selat Sunda
- Seblah Selatan: berbatasan dengan Kecamatan Anyer dan Kecamatan Mancak (Kabupaten Serang)
- Sebelah Timur: berbatasan dengan Kecamatan Kramatwatu tepat di wilayah serdang (Kabupaten Serang)

Cilegon memiliki wilayah yang relatif landai di daerah tengah dan pesisir barat hingga timur kota, tetapi di wilayah utara cilegon topografi menjadi berlereng karena berbatasan langsung gunung batur, sedangkan di wilayah selatan topografi menjadi sedikit berbukit-bukit terutama wilayah yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Mancak.

Kota ini memiliki wilayah strategis yang berhubungan langsung dengan selat sunda, dan terhubung dengan jalan tol Jakarta - Merak. Selain itu rencana pembangunan Jembatan Selat Sunda yang nantinya akan terkoneksi dengan jalan lingkar selatan Kota Cilegon menambah tingkat konektivitas Kota ini dengan daerah lain di sekitarnya.

Berdasarkan administrasi pemerintahan, Kota Cilegon memiliki luas wilayah  $\pm 17.550$  Ha terbagi atas 8 (delapan) Kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) No.15 Tahun 2002 Tentang Pembentukan 4 (empat) Kecamatan baru, wilayah Kota Cilegon yang semula terdiri dari 4 (empat) kecamatan, yaitu Kecamatan Cilegon, Kecamatan Cibeer, Kecamatan Ciwandan, dan Kecamatan Pulomerak, selanjutnya dibagi menjadi 8 (delapan) Kecamatan, yaitu :

- Kecamatan Cilegon
- Kecamatan Ciwandan
- Kecamatan Pulomerak
- Kecamatan Cibeer
- Kecamatan Grogol
- Kecamatan Purwakarta
- Kecamatan Citangkil
- Kecamatan Jombang

## 7. Kota Tangerang



Gambar 8. Peta Kota Tangerang

Kota Tangerang adalah sebuah kota yang terletak di Tatar Pasundan Provinsi Banten, Indonesia. Kota ini terletak tepat di sebelah barat ibu kota negara Indonesia, Jakarta. Kota Tangerang berbatasan dengan Kabupaten Tangerang di sebelah utara dan barat, Kota Tangerang Selatan di sebelah selatan, serta Daerah Khusus Ibukota Jakarta di sebelah timur. Tangerang merupakan kota terbesar di Provinsi Banten serta ketiga terbesar di kawasan Jabodetabek setelah Jakarta dan Bekasi di provinsi Jawa Barat dan dilalui oleh Jalan Nasional Rute 1.

Kota Tangerang terdiri atas 13 kecamatan, yang dibagi lagi atas sejumlah 104 kelurahan. Dahulu Tangerang merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Tangerang, kemudian ditingkatkan statusnya menjadi kota administratif, dan akhirnya ditetapkan sebagai kotamadya pada tanggal 28 Februari 1993. Sebutan 'kotamadya' diganti dengan 'kota' pada tahun 2001. Pada saat pembentukan Kotamadya Tangerang, hanya terdiri dari 6 kecamatan, yaitu:

1. Kecamatan Batuceper (terdiri dari Kelurahan Neglasari, Selapajang Jaya, Karangsari, Batujaya, Poris Gaga, Batuceper, Benda, Belendung, Jurumudi, Pajang, Kedaung Wetan)
2. Kecamatan Tangerang (terdiri dari kelurahan Sukarasa, Sukasari, Tanah Tinggi, Cikokol)
3. Kecamatan Cimone (terdiri dari kelurahan Pabuaran, Gerendeng, Pabuaran Tumpeng, Bugel, Pasar Baru, Karawaci, Cimone, Karawaci Baru)
4. Kecamatan Ciledug (terdiri dari kelurahan Pedurenan, Sudimara Barat, Sudimara Timur, Tajur, Paninggilan, Parung Serab, Larangan Utara, Larangan Selatan, Cipadu, Kreo, Pondok Bahar, Karang Tengah, Karang Mulya)
5. Kecamatan Jatiuwung (terdiri dari kelurahan Periuk, Gembor, Gebang Raya, Jatiuwung, Keroncong, Jatake, Pasir Jaya, Gandasari, Cibodas, Panunggangan Barat)
6. Kecamatan Cipondoh (terdiri dari kelurahan Poris Plawad, Cipete, Panunggangan, Kunciran, Pinang, Gondrong, Petir, Cipondoh).

Pada tahun 2001, saat penyebutannya diganti dari "Kotamadya" menjadi "Kota", dibentuk 7 kecamatan baru dan beberapa kelurahan baru yang merupakan pemekaran dari kecamatan induknya. Kecamatan-kecamatan baru tersebut, yaitu:

1. Kecamatan Benda, merupakan pemekaran dari Kecamatan Batuceper
2. Kecamatan Cibodas, merupakan pemekaran dari Kecamatan Jatiuwung
3. Kecamatan Karangtengah, merupakan pemekaran dari Kecamatan Ciledug
4. Kecamatan Larangan, merupakan pemekaran dari Kecamatan Ciledug
5. Kecamatan Neglasari, merupakan pemekaran dari Kecamatan Batuceper
6. Kecamatan Periuk, merupakan pemekaran dari Kecamatan Jatiuwung
7. Kecamatan Pinang, merupakan pemekaran dari Kecamatan Cipondoh

Saat ini, Kota Tangerang terbagi menjadi 13 kecamatan, yaitu:

Batuceper, Benda, Cibodas, Ciledug, Cipondoh, Jatiuwung, Karangtengah, Karawaci, Larangan, Neglasari, Periuk, Pinang, Tangerang.

## 8. Kota Tangerang Selatan



*Gambar 9. Peta Kota Tangerang Selatan*

Kota Tangerang Selatan adalah sebuah kota yang terletak di Tatar Pasundan Provinsi Banten, Indonesia. Kota ini terletak 30 km sebelah barat Jakarta dan 90 km sebelah tenggara Serang, ibu kota Provinsi Banten. Kota Tangerang Selatan berbatasan dengan Kota Tangerang di sebelah utara, Kabupaten Bogor (Provinsi Jawa Barat) di sebelah selatan, Kabupaten Tangerang di sebelah barat, serta Daerah Khusus Ibukota Jakarta di sebelah timur. Dari segi jumlah penduduk, Tangerang Selatan merupakan kota terbesar kedua di Provinsi Banten setelah Kota Tangerang serta terbesar kelima di kawasan Jabodetabek setelah Jakarta, Bekasi, Tangerang, dan Depok. Wilayah Kota Tangerang Selatan merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Tangerang.

Tangerang Selatan terletak di bagian timur Provinsi Banten yaitu pada titik koordinat 106°38' - 106°47' Bujur Timur dan 06°13'30' - 06°22'30' Lintang Selatan.

Wilayah Kota Tangerang Selatan diantaranya dilintasi oleh Kali Angke, Kali Pesanggrahan dan Sungai Cisadane sebagai batas administrasi kota di sebelah barat. Letak geografis Tangerang Selatan yang berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta pada sebelah utara dan timur memberikan peluang pada Kota Tangerang Selatan sebagai salah satu daerah penyangga provinsi DKI Jakarta, selain itu juga sebagai daerah yang menghubungkan Provinsi Banten dengan DKI Jakarta. Selain itu, Tangerang Selatan juga menjadi salah satu daerah yang menghubungkan Provinsi Banten dengan Provinsi Jawa Barat.

Tabel 4. Batas Wilayah Kota Tangerang Selatan

Utara	Kota Tangerang
Selatan	Kabupaten Bogor dan Kota Depok
Barat	Kabupaten Tangerang
Timur	Kota Administrasi Jakarta Selatan



Tangerang Selatan terdiri atas 7 kecamatan, yang dibagi lagi atas 49 kelurahan dan 5 desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008, Tangerang Selatan terdiri atas 7 (tujuh) kecamatan:

1. Serpong dengan luas 2.404 Ha
2. Serpong Utara dengan luas 1.784 Ha
3. Ciputat dengan luas 1.838 Ha
4. Ciputat Timur dengan luas 1.543 Ha
5. Pondok Aren dengan luas 2.988 Ha
6. Pamulang dengan luas 2.682 Ha
7. Setu dengan luas 1.480 Ha

### C. Mutu Layanan PAUD dan Dikmas

Mutu layanan PAUD dan Dikmas mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013: Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 1 ayat 1. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lingkup Standar Nasional Pendidikan meliputi (PP 32/2013 pasal 2 ayat 1): 1. standar isi 2. standar proses 3. standar kompetensi lulusan 4. standar pendidik dan tenaga kependidikan 5. standar sarana dan prasarana 6. standar pengelolaan 7. standar pembiayaan 8. standar penilaian pendidikan.

Diharapkan seluruh lembaga PAUD dan Dikmas nanti akan sesuai dengan standar dari pemerintah ini. Adapun penjelasan ke 8 standar tersebut antara lain sebagai berikut ;

1. Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan (PP 32/2013 pasal 1 ayat 5);
2. Standar Isi adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat Kompetensi untuk mencapai Kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu (pasal 1 ayat 6);
3. Standar Proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan (pasal 1 ayat 7);
4. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah kriteria mengenai pendidikan prajabatan dan kelayakan maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan (pasal 1 ayat 8);

Standar Sarana dan Prasarana adalah kriteria mengenai ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (pasal 1 ayat 9);

5. Standar Pengelolaan adalah kriteria mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan (pasal 1 ayat 10);

6. Standar Pembiayaan adalah kriteria mengenai komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun (pasal 1 ayat 11);
7. Standar Penilaian Pendidikan adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar Peserta Didik (pasal 1 ayat 12);

#### D. Metode Pengukuran Capaian Mutu

Metode yang digunakan dalam pengukuran capaian mutu layanan PAUD dan Dikmas adalah dengan menggunakan 8 Standar Nasional Pendidikan sesuai dengan PP No. 32 tahun 2013, dan Penggunaan Aplikasi Pemetaan Mutu. Hal ini ditujukan agar terdapat kesamaan capaian mutu layanan PAUD dan Dikmas. Prosedur atau tata cara penggunaan aplikasi sudah dibuat sedemikian rupa, sehingga dapat digunakan oleh semua lembaga Tim Admin Pusat, Admin UPT PP/BP, Verifikator, dan Lembaga satuan PAUD dan Dikmas.

Terdapat beberapa kriteria yang menjadi patokan dalam analisis data pemetaan mutu yakni :

1. Data Instrumen *Offline*, dan 2. Data Berdasar Aplikasi Pemetaan Mutu. Untuk memudahkan dalam pengolahan data tersebut maka digunakan teknik pengukuran dengan menggunakan Penilaian Acuan Patokan (PAP). Kriteria PAP dengan rentang A, B, C, D dan E. Adapun dalam pengukuran tersebut tidak bermaksud untuk menilai lembaga secara dalam, akan tetapi hanya sebagai tolak ukur dalam menganalisis sebuah data. Adapun rentang nilai yang digunakan terdapat pada tabel berikut ini :

Tabel 5. Interval Nilai Kategori Capaian Mutu

No	Interval Nilai	Jenis Kategori
1	≥ 85	A
2	70 – 84,99	B
3	55 – 69,99	C
4	40 – 54,99	D
5	< 40	E

PAP digunakan untuk membandingkan skor yang diperoleh dengan suatu standar atau norma absolut (kriteria yang spesifik). Kriteria yang dimaksud adalah suatu tingkatan interval nilai standar mutu pendidikan yang telah ditetapkan terlebih dahulu sebelum pengukuran dilakukan.

Tujuan PAP adalah untuk mengukur secara pasti tujuan pemetaan mutu sesuai dengan kategorinya. PAP sangat bermanfaat dalam upaya peningkatan mutu pendidikan dimana dapat langsung diketahui dari kategori yang sudah ditentukan. Penentuan kategori mutu pendidikan PAUD dan Dikmas menggunakan interval 15. Artinya dari nilai maksimal 100, 15 angka teratas masuk dalam kategori A, 15 angka selanjutnya masuk kategori B, begitu seterusnya hingga kategori E. Khusus untuk kategori E, wilayahnya lebih dari 15, yaitu pada rentang 0-40.

#### E. Lembaga Satuan PAUD dan Dikmas Sasaran Pemetaan Mutu

Pada tahun 2017 ini lembaga sasaran pemetaan mutu se Provinsi Banten berjumlah 120 (Seratus Dua Puluh) dengan jumlah masing-masing perkab/kota sejumlah 15 (Lima Belas) Lembaga satuan PAUD dan Dikmas yang dipetakan mutunya. Adapun berdasarkan program layannya untuk PAUD sebanyak 65 (Enam Puluh Lima), LKP sebanyak 22 (Dua Puluh Dua) dan untuk PKBM sebanyak 33 (Tiga Puluh Tiga) lembaga. Untuk lebih rincinya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 6. Lembaga Sasaran Pemetaan Mutu PAUD dan Dikmas Tahun 2017

No	NPSN	Nama Lembaga	Jenis Satuan	Alamat	Kab/Kota
1	69841903	TK AN - NAFI 1	PAUD	JL. ALUN - ALUN SELATAN	Kab. Pandeglang
2	69841910	TK. TUNAS PULOSARI	PAUD	PARAPATAN CIKOLE	Kab. Pandeglang
3	69841925	TK. PGRI SINARJAYA	PAUD	KADUPANDAK	Kab. Pandeglang
4	69841934	TK. PERTIWI CIMANUK	PAUD	JLN RAYA LABUAN KM10	Kab. Pandeglang
5	69841871	TK AR-RAUDHATUL ULUM	PAUD	CIGONDANG MESJID	Kab. Pandeglang
6	K5657723	LKP Bina Insan Mandiri	LKP	Jl.Raya Labuan Km.3 Cidangiang Rt.02/02 Saruni	Kab. Pandeglang
7	K5657726	LKP Adhistie	LKP	Jl.Giri Elok 1 No.45 Cigadung	Kab. Pandeglang
8	K5657717	LKP Srikandi	LKP	Jl. Cilaja Km.01 Beunying Legon Kel. Bilaja Kec. Najasari Pandeglang 42261	Kab. Pandeglang
9	K5657736	LKP DWI PUTRA BANGSA	LKP	Jalan Raya Sumur KM 12 Ds. Ciburial Kec. Cimanggu Pandeglang	Kab. Pandeglang
10	K5657722	LKP Yayasan Sigma	LKP	Jl.Raya Serang Km.3 No.B2 Kr.Tanjung-Pandeglang 42251	Kab. Pandeglang
11	P2966360	PKBM SINAR LENTERA	PKBM	SIMPEUREUM KP. JAROKASANG	Kab. Pandeglang
12	P2966366	PKBM AHMAD DAHLAN	PKBM	KP. TARI KOLOT	Kab. Pandeglang
13	P2966354	PKBM HARAPAN CIMANUK	PKBM	RAYALABUAN KM. 10 BATU BANTAR CIMANUK	Kab. Pandeglang

14	P2966385	PKBM BINA INSANI	PKBM	KAMPUNG BOTOK	Kab. Pandeglang
15	P9934535	PKBM MUTIARA HIKMAH	PKBM	KP. CIBARENGKOK	Kab. Pandeglang
16	69889985	TK AR-ROYHAN	PAUD	Jl. Raya Petir Km 07 Sorok Masjid	Kab. Lebak
17	20622208	TK AISIYAH	PAUD	JL. PAPANGGO PINTU NO. 19	Kab. Lebak
18	20614856	TK PGRI II RANGKASBITUNG	PAUD	JL. SILIWANGI RANGKASBITUNG	Kab. Lebak
19	20614858	TK MARDI YUANA	PAUD	JL. MULTATULI NO. 20	Kab. Lebak
20	20614857	TK KARTIKA XIX – 40	PAUD	Jl. RT. Hardiwinangun No. 48	Kab. Lebak
21	69890067	KB DARUL ILMU	PAUD	KP. BANDUNG RT / RW 02 / 01	Kab. Lebak
22	69893021	KB PELITA	PAUD	KP.CINANGGA	Kab. Lebak
23	69909156	TK AL – MAWADDAH	PAUD	KP.PASIR NANGKA RT 01 RW 01	Kab. Lebak
24	69890094	TK AL HAYATI	PAUD	JL.RAYA BAYAH - CIBARENO KM 35	Kab. Lebak
25	20614970	TK TUNAS KARYA	PAUD	RY CIPANAS KM 7	Kab. Lebak
26	P2965476	PKBM PELANGI ILMU	PKBM	Kp. Kadulari Jln. Posko-Cileles Km. 02 Desa Harjawana	Kab. Lebak
27	P2960386	PKBM PANGAYOM	PKBM	JL. Cibuah Parage Km. 04	Kab. Lebak
28	K0564471	LKP Permata	LKP	BTN Palaton Blok C3/17 RT 03 RW 12	Kab. Lebak
29	K0564523	LKP Sri Artha Jaya	LKP	Jl. Raya Bayah Malingping KM.3 Cimampang	Kab. Lebak
30	K5655876	LKP Dotnet Computindo	LKP	Jl. Siliwangi Komplek BTN Depag Blok C-1 No.16 Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak Pro	Kab. Lebak
31	69828349	KB JERAPAH KECIL	PAUD	KOMPLEK GRIYA SERDANG INDAH BLOK J1 NO 1	Kab. Serang
32	69828030	KOBER ANGGREK	PAUD	JL. NYIMAS CARIK KP. SITEMBAGA	Kab. Serang
33	69828044	KB TARBIYATUL AKHLAK	PAUD	Kp. Kejayan	Kab. Serang
34	69828043	KB ANUGRAH BUNDA	PAUD	CISEREH RT.04/03	Kab. Serang

35	69828186	KOBER MUTIARA BANGSA	PAUD	JL. SASAHAN 4 KP. BAROS	Kab. Serang
36	69914740	PAUD KASIH IBU	PAUD	Kp. Margiyasa	Kab. Serang
37	69828136	SPS MEKAR SULANJANA	PAUD	KAMPUNG CIBANDOS RT.05/02	Kab. Serang
38	69959654	KB PAUD NURUL ISLAM	PAUD	Kp. Undar Andir	Kab. Serang
39	69929363	PAUD KB HANIFAH	PAUD	Perumahan Taman Ciruas PErmai Blok 11 No. 42-43	Kab. Serang
40	69828285	KB BILQIS	PAUD	NAMBO-JAKARTA KM 10	Kab. Serang
41	69828125	KB BIRRUL WALIDAIN	PAUD	SAIT MUNCANG	Kab. Serang
42	69827981	KB. DAARUL MUTTAQIEN	PAUD	JL. CIPTAYASA KM.03 KP. KADIKARAN	Kab. Serang
43	K5658821	LKP Karisma	LKP	Jl. Raya Jakarta km 9 perumahan Griya Ampera Blok C No 5 RT 01/Rw 02 Kubangawan	Kab. Serang
44	P9952459	PKBM INSAN MULIA	PKBM	Kp. Sulang	Kab. Serang
45	P9926385	PKBM ANGSANA JAYA	PKBM	JL. CIBARU KM. 04 KP. KAREO RT. 03/01 DS. SINDANGKARYA KEC. ANYAR KAB. SERANG BA	Kab. Serang
46	69906426	KB LITTLE KOALA MONTESSORI	PAUD	JI EMPU BARADA RAYA NO.24-28	Kab. Tangerang
47	69769018	KB AS SYIFA	PAUD	KP. SUKAMULYA RT.13/06	Kab. Tangerang
48	69772248	KB BINA KREATIF INSANI	PAUD	JLN. RAYA BALARAJA KRONJO	Kab. Tangerang
49	69767757	KB AL MULK	PAUD	KP. PASIR LENGOH RT.01/05	Kab. Tangerang
50	69882939	TK SWEET BUTTERFLY MONTESSORI	PAUD	CLUSTER SAPHIRE BLOK A1-A4 DASANA INDAH	Kab. Tangerang
51	69785372	KB. AN NAJAH	PAUD	KP. JAWARINGAN RT.01/02	Kab. Tangerang
52	69769112	KB NURUL JANNAH	PAUD	KP. PARAHU RT.02/04	Kab. Tangerang
53	P9908841	PKBM MANDIRI	PKBM	JL. KH. DAHLAN RT 03/01 DESA TANJAKAN MEKAR KEC. RAJEG	Kab. Tangerang
54	P2965526	PKBM IBNU SINA	PKBM	Jl. Lingkar Selatan (JLS) Kp.Tigaraksa RT.01/03	Kab. Tangerang

55	P2965939	PKBM NUSANTARA	PKBM	Kp. serdang	Kab. Tangerang
56	P2965942	PKBM BHAKTI SEJAHTERA	PKBM	KP. BENDA	Kab. Tangerang
57	P2965855	PKBM BINA PUTRA INDONESIA	PKBM	Kp. Cijeruk	Kab. Tangerang
58	P9908817	PKBM BIMANINDO TERBIT TERANG	PKBM	JL.RAYA KP.BESAR RT 04/RW 02 DS.KP.BESAR KM 12 TNG	Kab. Tangerang
59	K5659999	LKP Akilah	LKP	Perum Citra Raya, Jl. Taman Puspa Blok C.2 Kel. Cikupa, Kec. Cikupa Kab. Tangera	Kab. Tangerang
60	K5659990	Yayasan Faida Cendikia Perdana	LKP	Jl. Masjid Daarul Ulum No 3 Rt 01c/01 No 3 Curug Tangerang Kode pos 15810	Kab. Tangerang
61	20616094	TK BINA BUDHI BANGSA	PAUD	TAMAN BANTEN LESTARI BLOK E11D NO. 19-21	Kota Serang
62	69830307	TK PEMBINA KECAMATAN	PAUD	CIRUAS PETIR KM 4 WALANTAKA	Kota Serang
63	69903538	KOBER MUSLIMAT NU	PAUD	Komp. Makmur Jaya RT.02 RW.09 GG Cendana	Kota Serang
64	69766434	TK AL-MUSYAWARAH.1	PAUD	JL. TB SUWANDI GG. PRINTIS RAYA RT 1/16	Kota Serang
65	69753731	TKN PEMBINA KOTA SERANG	PAUD	JL. BHAYANGKARA KOMP. GRIYA SERANG ASRI	Kota Serang
66	K5666155	LKP D-Tech Prima Komputer	LKP	Jl. Simpang 5 Ciracas Sepang Kota Serang, Banten 42116	Kota Serang
67	K5666109	LKP Yetty	LKP	Jl.Kagungan No.7A Lontar Kidul, Serang, Banten	Kota Serang
68	K5666140	LKP Noval	LKP	Jl. Raya Banten Lama Km.3 No.10 Kasunyatan Kasemen Kota.Serang Banten 42191	Kota Serang
69	P2962615	PKBM AL-MUWWAHID	PKBM	Jl. Ciruas KM 06 Kp Lebak	Kota Serang
70	P2962608	PKBM HARAPAN WARGA	PKBM	Jl. Takari KM 7 Kp. Kubang	Kota Serang
71	P2968145	PKBM BINA PENGAYOMAN	PKBM	JL. JAKSA AGUNG	Kota Serang

				SUPRAPTO 05	
72	P2962606	PKBM THOLABUL ILMU	PKBM	Jl. Samaun Bakrie No. 75 Lopang Gede RT. 007/001	Kota Serang
73	P2962614	PKBM AL-AZKIA	PKBM	Jl. Ciruas Walantaka KM2 Puri Citra BF10/15	Kota Serang
74	P9948300	PKBM PEMUDA	PKBM	JL. 45 Simpang Tiga Sandilaman Rt.02 Rw.03 Sayar	Kota Serang
75	P2962612	PKBM AL-AZIZIYAH	PKBM	Jl. Ki Beji Kp. Trenggana	Kota Serang
75	K0560731	LKP Tari Seruni	LKP	Jl. M.Abdullah No.3 Rt.03 Rw.1 Citangkil Kota.Cilegon Banten	Kota Cilegon
76	K0560679	LKP Risalah Education Center (REC)	LKP	Jl. Kubang Welingi NO.16Rt.007 Rw.003 Purwakarta Cilegon Banten	Kota Cilegon
77	69766427	TKIT PARADISE	PAUD	SUTAN SYAHRIR NO.32	Kota Cilegon
78	69766104	KB PAUD ABC (AMONG BOCAH CILIK)	PAUD	LEUWEUNG SAWO	Kota Cilegon
79	69931037	PAUD ARAFAH	PAUD	LINK. BARU RT04 / 04	Kota Cilegon
80	69944630	PAUD CAHYANINGRUM AL- BANTANI	PAUD	LINK. TEGALWANGI SOLOR RT02/06	Kota Cilegon
81	69935423	PAUD AL-KAUTSAR	PAUD	Link. Lebak Gede Indah RT. 02/09 Kel. Lebak Gede Kec. Pulomerak	Kota Cilegon
82	69772852	KB PAUD TUNAS MANDIRI	PAUD	YOS SUDARSO	Kota Cilegon
83	69831354	KB BANI ISYA	PAUD	Link. Baru	Kota Cilegon
84	69900559	PAUD ACHSAN CILEGON	PAUD	JL. LADA A3 NO.2 BBS 2 RT.07/06	Kota Cilegon
85	69882556	KB AL-JIHAD	PAUD	LINK. LANGON	Kota Cilegon
86	69798008	KB AT-THOHIRIYAH	PAUD	JL. PABEAN LINK.KALIGANDU	Kota Cilegon
87	20614691	TK BINA BUDI 2	PAUD	JL.IR. SUTAMI DS.KEBONSARI CITANGKIL	Kota Cilegon
88	P9948301	PKBM ISTIQOMAH	PKBM	Jl. Hamzah Link. Pringori	Kota Cilegon
89	P9908665	PKBM MELATI	PKBM	LINK. CURUG SEKOLAH RT 03/02 KEL. BAGENDUNG KECL. CILEGON KOTA	Kota Cilegon

				CILEGON PROV.	
90	K0560731	LKP Tari Seruni	LKP	Jl. M.Abdullah No.3 Rt.03 Rw.1 Citangkil Kota.Cilegon Banten	Kota Cilegon
91	20614752	TK ISLAM AS SYUKRIYAH	PAUD	JL KH HASYIM ASHARI NO 60 PORIS PLAWAD	Kota Tangerang
92	20614753	TK AISIYIAH 76	PAUD	JL SEKTOR VII BLOK F NO 14	Kota Tangerang
93	20614754	TK AISIYIAH 66	PAUD	JL. RADEN FATAH NO .120 A	Kota Tangerang
94	69762121	TK SURYA	PAUD	BLOK D 4 NO 13 PURATI ALAM INDAH	Kota Tangerang
95	69912849	TK DEWI SARTIKA	PAUD	KOMPLEKS KEHAKIMAN BLOK C NO 9 TANGERANG	Kota Tangerang
96	20614756	TK AISIYIAH BUSTANUL ATHFAL 75	PAUD	JL. KH. AHMAD DAHLAN RT.05/02 KEL. PETIR	Kota Tangerang
97	69933651	TK AZZIKRA	PAUD	Jln. Maulana Hasanudin GG Ampera 1 RT 001/01 Batuceper Kota Tangerang	Kota Tangerang
98	69762324	SPS TERATAI	PAUD	JL. NYIMAS MELATI NO. 2 RT. 02/02	Kota Tangerang
99	69907801	TK ISLAM KINASIH	PAUD	Jln. Matahari Rt. 003/04 No. 27 Sudimara Pinang	Kota Tangerang
100	69762313	SPS BINA TERATAI	PAUD	PERUM GRIYA MERPATI	Kota Tangerang
101	P296610 8	PKBM BINA WARGA	PKBM	Jl. Al-Hidayah	Kota Tangerang
102	P296615 6	PKBM MORINA	PKBM	KH Hasyim Ashari	Kota Tangerang
103	P296613 6	PKBM KARYA AGUNG	PKBM	JALAN MURAI RAYA KAVLING PERKEBUNAN	Kota Tangerang
104	K566645 6	LKP cerdas Istimewa	LKP	Komp. Mahkota Mas Blok B 10 Jl. MH.	Kota Tangerang



				Thamrin Cikokol Tangerang Banten 15117	
105	K566645 7	LKP Dely Ric	LKP	Jl. Sudimara Selatan RT 02 RW 01 ciledug Kota Tangerang Prov. Banten	Kota Tangerang
106	69815502	KB PERMATA ASRI	PAUD	CEMARA RAYA RF 3 NO. 6 BSD	Kota Tangerang Selatan
107	69926422	PAUD AL-IKHLAS	PAUD	Jl. Salak Putih Kp. Bojoing RT.02/012	Kota Tangerang Selatan
108	69815483	PAUD DHARMA BANGSA	PAUD	Komplek Bumi Pelita Kencana	Kota Tangerang Selatan
109	69815516	PAUD FADHILLAH	PAUD	JL H BASIR KP CEGER	Kota Tangerang Selatan
110	69815500	PAUD MUTHIA	PAUD	CENDANA 2 RT05/04 NO 62	Kota Tangerang Selatan
112	P296758 3	PKBM GELIAT BOCAH KAMPOENG PROGRAM	PKBM	JL. LUK PERUMAHAN GRIA ASRI	Kota Tangerang Selatan
113	P993473 7	PKBM PENERUS BANGSA	PKBM	Jl. Sukamulya 1 RT.02/08	Kota Tangerang Selatan
114	P994798 1	PKBM PEMIMPIN ANAK BANGSA	PKBM	Bintaro Trade Center Blok F1 No.10 Bintaro Sek. IX	Kota Tangerang Selatan
115	P296935 9	PKBM INSAN MAARIF	PKBM	Jl. Rajawali Dalam 01/02 No.55	Kota Tangerang Selatan
116	P990871 5	PKBM TECHNOSA	PKBM	JL. MELATI RAYA BLOK P2 NO.24 VILLA MELATI MAS	Kota Tangerang Selatan
117	P296709 8	PKBM KI HAJAR DEWANTARA	PKBM	JL.PENDIDIKAN NO.5 CIPUTAT	Kota Tangerang Selatan
118	K566654 9	LKP KUNCI JEMARI	LKP	Jln. W. R. Supratman No 92 Ciputat Timur Tangerang Selatan Banten 15412	Kota Tangerang Selatan
119	K566654 3	LKP CITRA KENANGA	LKP	Komplek Pondok Maharta Blok B.26 No 38 Pondok Kacang	Kota Tangerang Selatan

				Timur Tangerang Selatan Ban	
120	K566653 9	LKP TITIK KUSUMA	LKP	Pamulang Permai I Blok. A-24/01 RT. 03/15 Kelurahan Pamulang Barat, Kec. Pamulan	Kota Tangerang Selatan

### BAB III

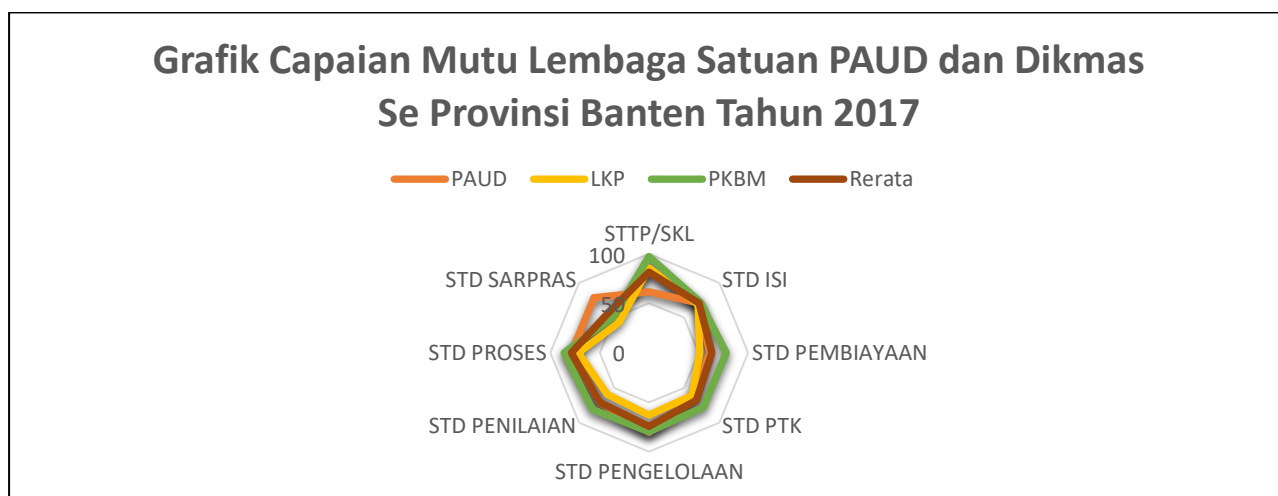
#### CAPAIAN MUTU PAUD DAN DIKMAS TAHUN 2017

Program-program PAUD dan Dikmas yang dipetakan mutunya baru mencakup pada pemetaan Lembaga belum termasuk programnya yang meliputi Lembaga PAUD, Lembaga LKP, dan Lembaga PKBM. Adapun lembaga sasaran pemetaan mutu pada tahun 2017 ini berjumlah 120 (seratus dua puluh) lembaga satuan PAUD dan Dikmas yang terinci pada tabel dibawah ini :

Tabel 6. Jumlah lembaga PAUD dan Dikmas berdasarkan data Dapodik Se Provinsi Banten tahun 2017

Kab/Kota	Lembaga Satuan Sasaran Pemetaan Mutu			Tahun Pemetaan Mutu		Jumlah Lembaga Satuan PAUD dan Dikmas	
	PAUD	LKP	PKBM	2017	Jumlah	Dapodik	Sisa
1. Kab. Pandeglang	5	5	5	15	15	892	877
2. Kab. Lebak	10	3	2	15	15	904	889
3. Kab. Serang	12	1	2	15	15	1.127	1.112
4. Kab. Tangerang	7	2	6	15	15	1.363	1.348
5. Kota Serang	5	3	7	15	15	497	482
6. Kota Cilegon	11	2	2	15	15	355	340
7. Kota Tangerang	10	2	3	15	15	828	813
8. Kota Tangerang Selatan	5	6	4	15	15	896	881
<b>Total</b>	<b>65</b>	<b>22</b>	<b>33</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>6.862</b>	<b>6.742</b>

A. Capaian Mutu Lembaga Satuan PAUD dan Dikmas (PAUD, LKP, dan PKBM) Se Provinsi Banten



Gambar 10. Grafik Capaian Mutu Lembaga Satuan PAUD dan Dikmas Se Provinsi Banten Tahun 2017

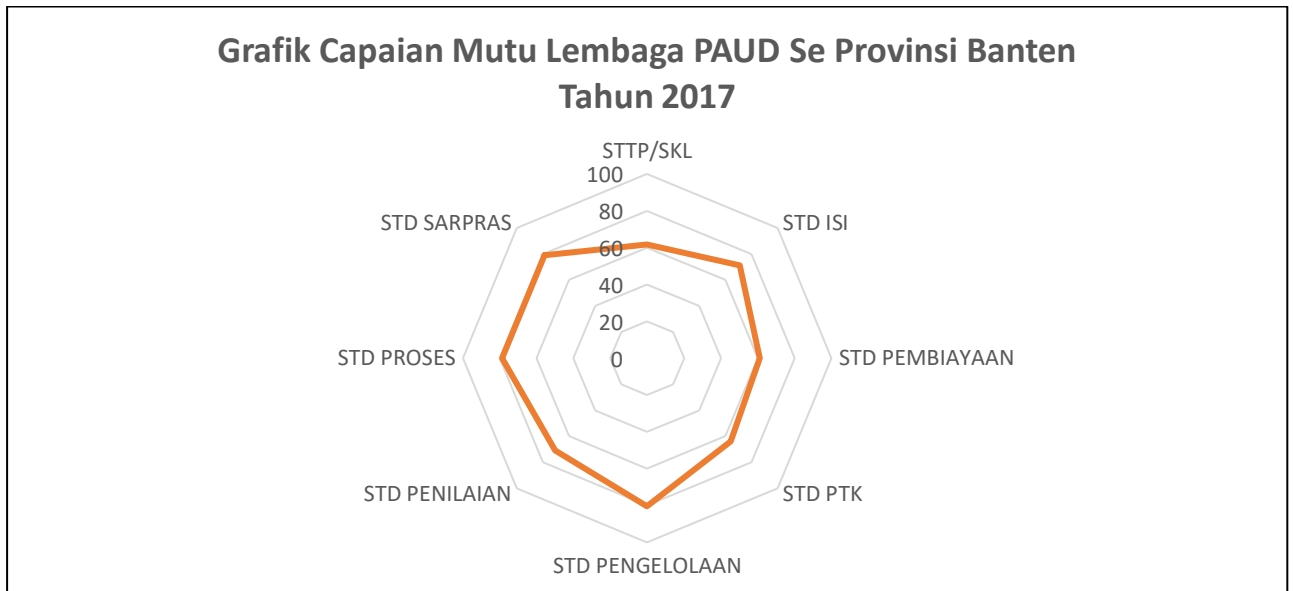
Berdasarkan hasil analisis mengenai rerata capaian mutu PAUD dan Dikmas di Provinsi Banten Tahun 2017 berdasarkan pada persentase tertinggi dan terendah yang mengacu pada metode pengukuran PAP. Adapun untuk persentase tertinggi capaian rerata lembaga satuan PAUD dan Dikmas di Provinsi Banten yaitu pada Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan/Kelulusan sebesar 81,58 % bisa diinterpretasikan bahwa lembaga sudah memenuhi indikator dalam hal tingkat pencapaian perkembangan anak dan/atau kelulusan peserta didik dengan kategori “B”.

Adapun untuk persentase terendah capaian rerata Lembaga satuan PAUD dan Dikmas di Provinsi Banten yaitu pada Standar Sarana dan Prasarana sebesar 57,81 % sehingga bisa kita interpretasikan bahwa Lembaga Satuan yang berada di Provinsi Banten sangat minim sekali kaitan dengan Sarana Prasarana dengan kategori “C”, dengan kata lain diperlukan Revitalisasi Sarana Prasarana melalui Bantuan Pemerintah baik di tingkat Ditjen PAUD dan Dikmas, BP PAUD dan Dikmas Banten, serta Pemerintah Kab/Kota Se Provinsi Banten melalui Dinas Pendidikan Kab/Kota masing-masing.

#### 1. Capaian Standar Mutu PAUD Se Provinsi Banten

Tabel 7. Pemetaan Mutu PAUD se Provinsi Banten Tahun 2017

No	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga/SP			
		Terdaftar	Terisi	Terpetakan	Terverifikasi
		(Jml Lembaga)	(Jml yg sudah Mengisi )	(Jml Sasaran Pemetaan)	(Jml yg sudah diverifikasi )
1	Kab. Pandeglang	757	50	5	5
2	Kab. Lebak	739	29	10	10
3	Kab. Tangerang	1183	66	7	8
4	Kab. Serang	976	28	12	12
5	Kota Cilegon	250	16	11	11
6	Kota Tangerang	719	495	10	10
7	Kota Serang	331	10	5	5
8	Kota Tangerang Selatan	799	25	5	5
	<b>TOTAL</b>	5754	719	65	66



Gambar 11. Grafik Capaian Mutu PAUD se Provini Banten Tahun 2017

DETIL HASIL PEMETAAN	
JUMLAH LEMBAGA	65 Lembaga
RATA-RATA TERCAPAI STANDAR	70.86 %
STANDAR ISI	71.11 %
STANDAR PEMBIAYAAN	61.11 %
STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	64.08 %
STANDAR PENGELOLAAN	80.4 %
STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN	70.83 %
STANDAR PROSES	78.77 %
STANDAR SARANA DAN PRASARANA	78.9 %
STANDAR TINGKAT PENCAPAIAN PERKEMBANGAN	61.7 %

Gambar 12. Detail Hasil Capaian Mutu PAUD se Provini Banten Tahun 2017

Rata-rata capaian mutu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) baik Tempat Penitipan Anak (TPA), Kelompok Belajar (KB), Taman Kanak-Kanak (TK), maupun Satuan Pendidikan Sejenis lainnya (SPS) di Provinsi Banten tahun 2017, berdasarkan hasil analisis pada persentase tertinggi adalah pada standar pengelolaan sebesar 80,4% yang bisa diinterpretasikan bahwa lembaga satuan PAUD memiliki tingkat pengelolaan dengan kategori “B” (Baik).

Sedangkan, pada persentase terendah yaitu terdapat pada standar pembiayaan sebesar 61,11% dengan kategori C (Cukup) sehingga bisa diinterpretasikan bahwa lembaga satuan PAUD memiliki kelemahan pada pembiayaan dan perlu direkomendasikan untuk peningkatan Bantuan Operasional Lembaga, dan Operasional untuk pendidik dan tenaga kependidikannya.

Adapun untuk lebih rinci terpenuhi atau tidak terpenuhi pada indikator perstandar maka dapat dilihat pada tabel berikut di bawah ini :

Tabel 8. Indikator Perstandar PAUD se Provinsi Banten Tahun 2017

No	Standar Nasional Pendidikan	Indikator	Jumlah Lembaga(SP)	Jml lembaga (SP) yang memenuhi	Jml Lembaga(SP) tidak memenuhi
1	STANDAR TINGKAT PENCAPAIAN PERKEMBANGAN	Dokumentasi Pencapaian Perkembangan	65	65	0
2	STANDAR TINGKAT PENCAPAIAN PERKEMBANGAN	Dokumen Pencapaian Perkembangan Sesuai Kelompok Usia	65	2	63
3	STANDAR TINGKAT PENCAPAIAN PERKEMBANGAN	Pendokumentasian Pencapaian Perkembangan	65	49	16
4	STANDAR ISI	Struktur Kurikulum ( Cakupan Aspek Perkembangan)	65	54	11
5	STANDAR ISI	Struktur Kurikulum ( Pelaksanaan 6 Aspek Perkembangan)	65	59	6
6	STANDAR ISI	Acuan Kurikulum	65	20	45
7	STANDAR ISI	Peninjauan Kurikulum	65	48	17
8	STANDAR ISI	Layanan Menurut Kelompok Usia	65	53	12
9	STANDAR ISI	Beban Belajar (Waktu Efektif Per Hari)	65	33	32
10	STANDAR ISI	Beban Belajar (Waktu Efektif Per Minggu)	65	32	33
11	STANDAR ISI	Rombongan Belajar (Rasio Pendidik dan Peserta didik)	65	0	65
12	STANDAR ISI	Aspek Pengembangan	65	55	10
13	STANDAR ISI	Bentuk Kalender Pendidikan	65	43	22
14	STANDAR ISI	Substansi Kalender Pendidikan	65	54	11

15	STANDAR ISI	Sosialisasi Kalender Pendidikan	65	56	9
16	STANDAR PROSES	Rencana Kegiatan Semester	65	47	18
17	STANDAR PROSES	Rencana Kegiatan Mingguan	65	44	21
18	STANDAR PROSES	Rencana Kegiatan Harian	65	60	5
19	STANDAR PROSES	Cakupan Program Holistik Integratif	65	40	25
20	STANDAR PROSES	Jumlah Catatan yang Memuat Program Holistik Integratif	65	26	39
21	STANDAR PROSES	Penataan Lingkungan Main	65	57	8
22	STANDAR PROSES	Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran	65	59	6
23	STANDAR PROSES	Penggorganisasian Kegiatan Pembelajaran	65	48	17
24	STANDAR PROSES	Waktu Penilaian Proses dan hasil Pembelajaran	65	39	26
25	STANDAR PROSES	Teknik Penilaian	65	55	10
26	STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Kualifikasi Akademik Pendidik	65	47	18
27	STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Kompetensi Pendidik	65	4	61
28	STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Kualifikasi Akademik Tenaga Kependidikan	65	29	36
29	STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Kompetensi Tenaga Kependidikan	65	11	54
30	STANDAR SARANA DAN PRASARANA	Sarana Pendidikan	65	59	6
31	STANDAR SARANA DAN PRASARANA	Sarana Pembelajaran	65	56	9
32	STANDAR SARANA DAN PRASARANA	Luas Lahan	65	22	43
33	STANDAR SARANA DAN PRASARANA	Gedung (Jenis dan Jumlah Ruang)	65	44	21
34	STANDAR SARANA DAN PRASARANA	Persyaratan Ruang dan Halaman Bermain	65	56	9
35	STANDAR SARANA DAN PRASARANA	Status Kepemilikan	65	45	20

36	STANDAR SARANA DAN PRASARANA	Prasarana Instalasi	65	47	18
37	STANDAR PENGELOLAAN	Rumusan Visi	65	57	8
38	STANDAR PENGELOLAAN	Sosialisasi Visi, Misi dan Tujuan	65	42	23
39	STANDAR PENGELOLAAN	Rencana Kerja Tahunan	65	55	10
40	STANDAR PENGELOLAAN	Rencana Kerja Lima Tahunan	65	29	36
41	STANDAR PENGELOLAAN	Unsur-unsur yang termuat dalam Struktur Organisasi	65	50	15
42	STANDAR PENGELOLAAN	Deskripsi tugas pokok dan fungsi	65	40	25
43	STANDAR PENGELOLAAN	Jaringan Kemitraan	65	46	19
44	STANDAR PENGELOLAAN	Panduan Pelaksanaan	65	44	21
45	STANDAR PENGELOLAAN	Pengadministrasian	65	57	8
46	STANDAR PENGELOLAAN	Sistem Informasi Manajemen	65	53	12
47	STANDAR PENGELOLAAN	Penjadwalan	65	42	23
48	STANDAR PENGELOLAAN	Pelaporan Hasil Pengawasan	65	38	27
49	STANDAR PENGELOLAAN	Unsur Penilaian	65	48	17
50	STANDAR PENGELOLAAN	Pendokumentasian	65	50	15
51	STANDAR PENGELOLAAN	Penghargaan	65	9	56
52	STANDAR PEMBIAYAAN	Jenis Pembiayaan	65	52	13
53	STANDAR PEMBIAYAAN	Sumber Pembiayaan	65	24	41
54	STANDAR PEMBIAYAAN	Laporan Penggunaan	65	15	50
55	STANDAR PEMBIAYAAN	Pengadministrasian	65	52	13
56	STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN	Panduan Penilaian	65	46	19
57	STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN	Teknik Penilaian	65	53	12
58	STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN	Pelaporan Hasil Penilaian	65	20	45
59	STANDAR PENGELOLAAN	Rumusan Misi	65	56	9
60	STANDAR PENGELOLAAN	Rumusan Tujuan	65	51	14

*Ket : data yang ditampilkan merupakan data yang sudah diverifikasi*

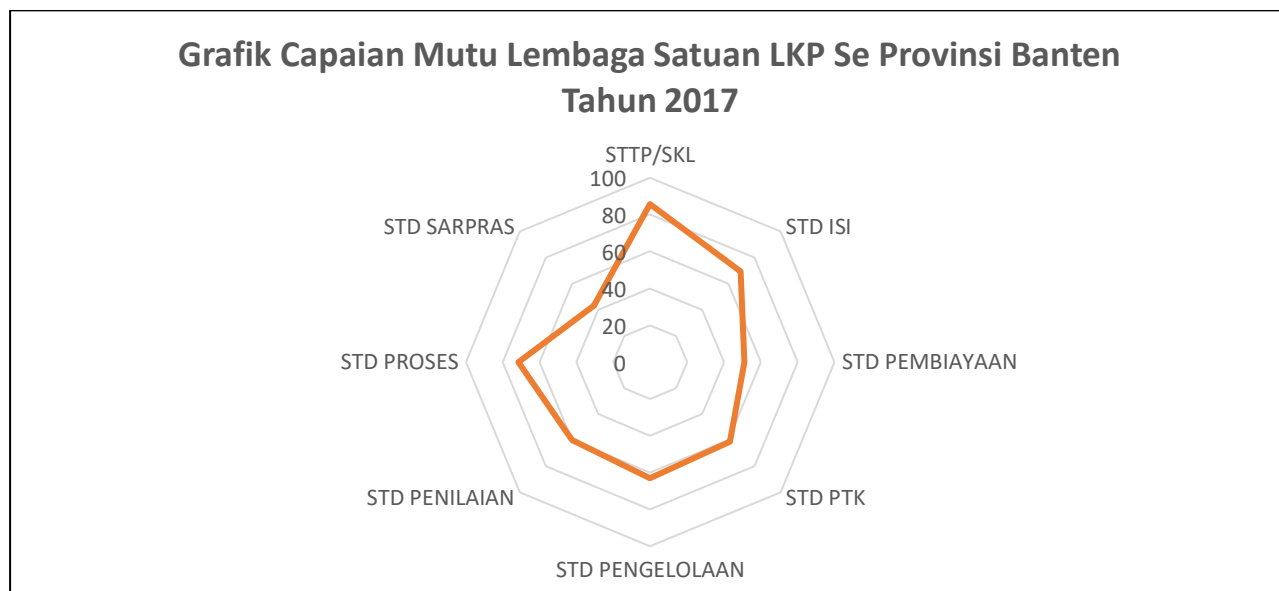


Pada tabel dengan list berwarna merah diperlukan perhatian khusus dari Dinas Pendidikan Kab/Kota, UPT BP PAUD dan Dikmas Banten, dan Ditjen PAUD dan Dikmas, serta pemangku kebijakan lainnya yang berkepentingan.

## 2. Capaian Standar Mutu LKP Se Provinsi Banten

Tabel 9. Pemetaan Mutu LKP se Provinsi Banten Tahun 2017

No	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga/SP			
		Terdaftar	Terisi	Terpetakan	Terverifikasi
		(Jml Lembaga)	(Jml yg sudah Mengisi )	(Jml Sasaran Pemetaan)	(Jml yg sudah diverifikasi )
1	Kab. Pandeglang	45	6	5	5
2	Kab. Lebak	94	7	3	3
3	Kab. Tangerang	63	2	2	2
4	Kab. Serang	44	3	1	1
5	Kota Cilegon	88	2	2	2
6	Kota Tangerang	65	3	2	3
7	Kota Serang	56	3	3	3
8	Kota Tangerang Selatan	47	5	4	4
	<b>TOTAL</b>	502	31	22	23



Gambar 13. Grafik Capaian Mutu LKP se Provinsi Banten Tahun 2017

DETIL HASIL PEMETAAN	
JUMLAH LEMBAGA	21 Lembaga
RATA-RATA TERCAPAI STANDAR	63.15 %
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	85.71 %
STANDAR ISI	69.55 %
STANDAR PEMBIAYAAN	51.14 %
STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	61.22 %
STANDAR PENGELOLAAN	63.08 %
STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN	59.85 %
STANDAR PROSES	71.54 %
STANDAR SARANA DAN PRASARANA	43.13 %

*Gambar 14. Detail Hasil Capaian Mutu LKP se Provinsi Banten Tahun 2017*

Rata-rata capaian mutu Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) di Provinsi Banten tahun 2017 berdasarkan hasil analisis pada persentase tertinggi adalah pada standar kompetensi lulusan sebesar 85,71% yang bisa diinterpretasikan bahwa lembaga satuan PAUD memiliki tingkat kelulusan dengan kategori B (Baik).

Sedangkan, pada persentase terendah yaitu terdapat pada standar sarana dan prasarana sebesar 43,13% dengan kategori C (Kurang) sehingga bisa diinterpretasikan bahwa Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) di Provinsi Banten memiliki kelemahan pada sarana dan prasarana yang dimiliki dan perlu direkomendasikan untuk mendapatkan bantuan revitalisasi sarana dan prasarana bagi Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) lebih diprioritaskan.

Adapun untuk lebih rinci terpenuhi atau tidak terpenuhi pada indikator perstandar maka dapat dilihat pada tabel berikut di bawah ini :

Tabel 10. Indikator Perstandar LKP se Provinsi Banten Tahun 2017

No	Standar Nasional Pendidikan	Indikator	Jumlah Lembaga(SP)	Jml lembaga (SP) yang memenuhi	Jml Lembaga(SP) tidak memenuhi
1	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Keberadaan SKL	21	20	1
2	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Acuan penyusunan SKL	21	13	8

3	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Rumusan SKL	21	21	0
4	STANDAR ISI	Materi Pembelajaran	21	17	4
5	STANDAR ISI	Struktur kurikulum dan penetapannya	21	18	3
6	STANDAR ISI	Evaluasi kurikulum secara periodik	21	15	6
7	STANDAR ISI	Cara melakukan evaluasi kurikulum	21	10	11
8	STANDAR ISI	Acuan penyusunan / pengembangan kurikulum	21	4	17
9	STANDAR ISI	Beban belajar peserta didik	21	18	3
10	STANDAR ISI	Pencapaian kompetensi peserta didik	21	19	2
11	STANDAR ISI	Kualifikasi kompetensi berjenjang	21	16	5
12	STANDAR ISI	Proporsi teori dan praktek	21	18	3
13	STANDAR ISI	Kalender program kursus dan pelatihan	21	15	6
14	STANDAR ISI	Sosialisasi Kalender program kursus dan pelatihan	21	3	18
15	STANDAR PROSES	Keberadaan silabus	21	15	6
16	STANDAR PROSES	Penyusun silabus	21	9	12
17	STANDAR PROSES	Evaluasi silabus	21	13	8
18	STANDAR PROSES	Keberadaan dan kesesuaian RPP dengan silabus	21	16	5
19	STANDAR PROSES	Penyusun RPP	21	17	4
20	STANDAR PROSES	Evaluasi RPP	21	15	6
21	STANDAR PROSES	Materi Pembelajaran	21	13	8

22	STANDAR PROSES	Kegiatan pembelajaran yang interaktif	21	10	11
23	STANDAR PROSES	Rasio alat belajar dengan jumlah peserta didik	21	8	13
24	STANDAR PROSES	Rasio pendidik dengan peserta didik	21	14	7
25	STANDAR PROSES	Panduan penilaian proses pembelajaran	21	10	11
26	STANDAR PROSES	Hasil penilaian proses pembelajaran	21	16	5
27	STANDAR PROSES	Kehadiran peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan	21	17	4
28	STANDAR PROSES	Laporan pengawasan proses pembelajaran	21	13	8
29	STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Kualifikasi akademik pendidik / instruktur	21	12	9
30	STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Kualifikasi akademik tenaga kependidikan	21	4	17
31	STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Kompetensi tenaga kependidikan	21	0	21
32	STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Kualifikasi akademik penguji	21	6	15
33	STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Kompetensi penguji	21	3	18
34	STANDAR SARANA DAN PRASARANA	Ketersediaan bahan ajar	21	4	17
35	STANDAR SARANA DAN PRASARANA	Sarana pembelajaran	21	12	9
36	STANDAR SARANA DAN PRASARANA	Tempat baca dan bahan bacaan	21	6	15
37	STANDAR SARANA DAN PRASARANA	Peralatan kantor dan meubeler	21	0	21

38	STANDAR SARANA DAN PRASARANA	Media pembelajaran	21	0	21
39	STANDAR SARANA DAN PRASARANA	Lahan dan gedung	21	15	6
40	STANDAR SARANA DAN PRASARANA	Status kepemilikan gedung	21	10	11
41	STANDAR SARANA DAN PRASARANA	Ruang penunjang pengelolaan	21	5	16
42	STANDAR SARANA DAN PRASARANA	Program pemeliharaan sarana dan prasarana	21	10	11
43	STANDAR SARANA DAN PRASARANA	SIM dan Fasilitas TIK	21	3	18
44	STANDAR SARANA DAN PRASARANA	Penyebaran informasi/ kebijakan	21	4	17
45	STANDAR PENGELOLAAN	Kepemimpinan LKP	21	13	8
46	STANDAR PENGELOLAAN	Kualifikasi Pimpinan	21	4	17
47	STANDAR PENGELOLAAN	Kompetensi Pimpinan	21	8	13
48	STANDAR PENGELOLAAN	Visi, misi, dan tujuan (jelas, realistik, terukur, spesifik)	21	13	8
49	STANDAR PENGELOLAAN	Sosialisasi visi misi dan tujuan	21	11	10
50	STANDAR PENGELOLAAN	Rencana kerja	21	13	8
51	STANDAR PENGELOLAAN	Sistem manajemen mutu	21	13	8
52	STANDAR PENGELOLAAN	Identitas papan nama	21	13	8
53	STANDAR PENGELOLAAN	legalitas lembaga	21	14	7
54	STANDAR PENGELOLAAN	Struktur organisasi dan uraian tugas personal	21	10	11
55	STANDAR PENGELOLAAN	Keberadaan operasional kursus dan pelatihan	21	2	19
56	STANDAR PENGELOLAAN	Strategi pemasaran	21	7	14

57	STANDAR PENGELOLAAN	Kemitraan dengan pihak lain.	21	1	20
58	STANDAR PENGELOLAAN	Bentuk kemitraan	21	10	11
59	STANDAR PENGELOLAAN	Penelusuran alumni	21	3	18
60	STANDAR PENGELOLAAN	Evaluasi Kinerja lembaga	21	6	15
61	STANDAR PENGELOLAAN	Laporan evaluasi pelaksanaan program kursus dan pelatihan	21	11	10
62	STANDAR PENGELOLAAN	Evaluasi Kinerja Pendidik	21	12	9
63	STANDAR PENGELOLAAN	Evaluasi Kinerja Tenaga Kependidikan	21	12	9
64	STANDAR PEMBIAYAAN	Rencana Anggaran Biaya (RAB) Tahunan	21	9	12
65	STANDAR PEMBIAYAAN	Pencatatan/pe mbukuan	21	14	7
66	STANDAR PEMBIAYAAN	Data Sumber Penerimaan Dana	21	0	21
67	STANDAR PEMBIAYAAN	Tata administrasi keuangan	21	4	17
68	STANDAR PEMBIAYAAN	Periode Pelaporan Keuangan	21	12	9
69	STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN	Panduan Pedoman Penilaian Akhir Pembelajaran	21	15	6
70	STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN	Komponen Pedoman penilaian	21	4	17
71	STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN	Keberadaan soal teori dan praktek	21	15	6
72	STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN	Penilaian hasil belajar	21	9	12
73	STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN	Ujian akhir lembaga (ujian lokal)	21	14	7

74	STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN	Uji kompetensi dari lembaga sertifikasi	21	1	20
75	STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN	Dokumen Hasil belajar peserta didik	21	14	7
76	STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN	Laporan hasil belajar peserta didik	21	7	14
77	STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Kompetensi Pendidik / instruktur	21	5	16
78	STANDAR PEMBIAYAAN	Penggunaan Keuangan	21	6	15

*Ket : data yang ditampilkan merupakan data yang sudah diverifikasi*

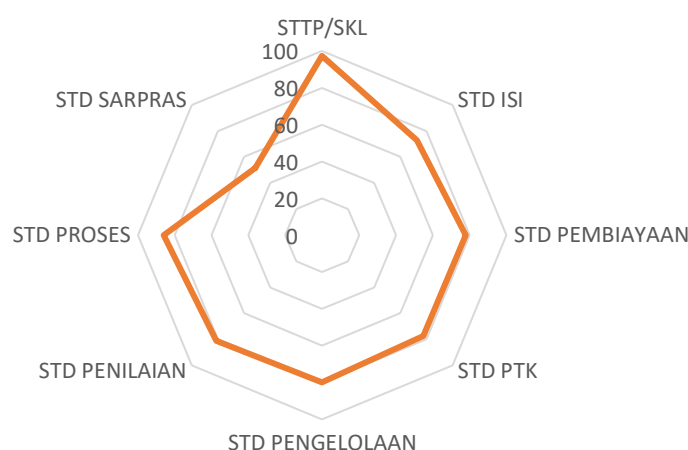
Pada tabel dengan list berwarna merah diperlukan perhatian khusus dari Dinas Pendidikan Kab/Kota, UPT BP PAUD dan Dikmas Banten, dan Ditjen PAUD dan Dikmas, serta pemangku kebijakan lainnya yang berkepentingan.

### 3. Capaian Standar Mutu PKBM Se Provinsi Banten

Tabel 11. Pemetaan Mutu PKBM Se Provinsi Banten Tahun 2017

No	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga/SP			
		Terdaftar	Terisi	Terpetakan	Terverifikasi
		(Jml Lembaga)	(Jml yg sudah Mengisi )	(Jml Sasaran Pemetaan)	(Jml yg sudah diverifikasi )
1	Kab. Pandeglang	48	6	5	5
2	Kab. Lebak	45	7	2	2
3	Kab. Tangerang	56	11	6	6
4	Kab. Serang	55	25	2	2
5	Kota Cilegon	15	2	2	2
6	Kota Tangerang	35	12	3	3
7	Kota Serang	47	8	7	8
8	Kota Tangerang Selatan	32	8	6	6
	<b>TOTAL</b>	333	79	33	34

## Grafik Capaian Mutu Lembaga Satuan PKBM Se Provinsi Banten Tahun 2017



Gambar 15. Grafik Capaian Mutu PKBM se Provinsi Banten Tahun 2017

DETIL HASIL PEMETAAN	
JUMLAH LEMBAGA	32 Lembaga
RATA-RATA TERCAPAI STANDAR	78.01 %
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	97.33 %
STANDAR ISI	72.76 %
STANDAR PEMBIAYAAN	77.92 %
STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	77.56 %
STANDAR PENGELOLAAN	79.89 %
STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN	81.12 %
STANDAR PROSES	86.05 %
STANDAR SARANA DAN PRASARANA	51.41 %

Gambar 16. Detail Hasil Pemetaan Mutu PKBM Se Provinsi Banten Tahun 2017

Rata-rata capaian mutu lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Provinsi Banten tahun 2017 berdasarkan hasil analisis pada persentase tertinggi adalah pada standar kelulusan yakni sebesar 97,33 % yang bisa diinterpretasikan bahwa PKBM memiliki standar Kelulusan paling tinggi pada masing-masing indikatornya dengan kategori “A” dan perlu disupervisi lebih lanjut.



Sedangkan, pada persentase terendah yaitu terdapat pada standar sarana dan prasarana sebesar 51,41% dengan kategori D(Kurang) sehingga bisa diinterpretasikan bahwa lembaga satuan PKBM memiliki kelemahan dan kekurangan pada sarana dan prasarana sehingga perlu disupervisi lebih lanjut untuk memastikan kondisi sarana dan prasarana lembaga, kemudian perlu direkomendasikan untuk peningkatan Bantuan Operasional Lembaga, dan revitalisasi sarana dan prasarana lembaga.

Adapun untuk lebih rinci terpenuhi atau tidak terpenuhi pada indikator perstandar maka dapat dilihat pada tabel berikut di bawah ini :

Tabel 12. Capaian Indikator Perstandar PKBM se Provinsi Banten Tahun 2017

No	Standar Nasional Pendidikan	Indikator	Jumlah Lembaga(SP)	Jml lembaga (SP) yang memenuhi	Jml Lembaga(SP) tidak memenuhi
1	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Rumusan SKL untuk program utama	32	37	0
2	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Rumusan capaian pembelajaran untuk program pendukung	32	36	0
3	STANDAR ISI	Jenis program utama dan pendukung	32	36	0
4	STANDAR ISI	Desa/kelompok binaan	32	26	0
5	STANDAR ISI	Struktur kurikulum	32	37	0
6	STANDAR ISI	Acuan kurikulum	32	37	0
7	STANDAR ISI	Jumlah jam belajar	32	5	27
8	STANDAR ISI	Proporsi teori dan praktik	32	9	23
9	STANDAR ISI	Kepemilikan dan sosialisasi kalender pendidikan	32	32	0
10	STANDAR PROSES	Silabus Mata Pelajaran	32	36	0
11	STANDAR PROSES	Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)	32	36	0
12	STANDAR PROSES	Penyusun RPP	32	35	0
13	STANDAR PROSES	Pengelolaan kelas	32	31	1
14	STANDAR PROSES	Metode pembelajaran	32	22	10
15	STANDAR PROSES	Presensi peserta didik	32	25	7
16	STANDAR PROSES	Presensi pendidik	32	37	0
17	STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Kualifikasi pendidik	32	33	0
18	STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Kompetensi pendidik Pendidikan Kesetaraan	32	21	11
19	STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Kompetensi pendidik Keaksaraan	32	11	21
20	STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Kompetensi pendidik Kecakapan Hidup	32	8	24

21	STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Kompetensi pendidik PAUD	32	11	21
22	STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Kompetensi pendidik TBM	32	7	25
23	STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Pengalaman pendidik	32	23	9
24	STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Kualifikasi tenaga kependidikan	32	18	14
25	STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Kompetensi tenaga kependidikan	32	13	19
26	STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Pengalaman tenaga kependidikan	32	14	18
27	STANDAR SARANA DAN PRASARANA	Kondisi peralatan pembelajaran	32	0	32
28	STANDAR SARANA DAN PRASARANA	Ketersediaan bahan ajar	32	27	5
29	STANDAR SARANA DAN PRASARANA	Kesesuaian bahan ajar	32	10	22
30	STANDAR SARANA DAN PRASARANA	Ketersediaan peralatan praktik	32	9	23
31	STANDAR SARANA DAN PRASARANA	Jenis dan Luas Ruang	32	15	17
32	STANDAR SARANA DAN PRASARANA	Status kepemilikan lahan dan bangunan	32	30	2
33	STANDAR PENGELOLAAN	Kualifikasi pimpinan	32	28	4
34	STANDAR PENGELOLAAN	Kompetensi pimpinan	32	17	15
35	STANDAR PENGELOLAAN	Forum perwakilan masyarakat	32	22	10
36	STANDAR PENGELOLAAN	Rumusan Visi	32	35	0
37	STANDAR PENGELOLAAN	Rumusan Misi	32	34	0
38	STANDAR PENGELOLAAN	Rumusan Tujuan	32	32	0
39	STANDAR PENGELOLAAN	Kesesuaian desa/kelompok binaan	32	28	4
40	STANDAR PENGELOLAAN	Rencana kerja lima tahunan	32	25	7
41	STANDAR PENGELOLAAN	Rencana kerja tahunan	32	30	2
42	STANDAR PENGELOLAAN	Rencana pendanaan	32	25	7
43	STANDAR PENGELOLAAN	Identifikasi kebutuhan belajar masyarakat (IKBM)	32	27	5

44	STANDAR PENGELOLAAN	Penggunaan hasil IKBM	32	25	7
45	STANDAR PENGELOLAAN	Keterlibatan masyarakat	32	27	5
46	STANDAR PENGELOLAAN	Papan nama lembaga	32	34	0
47	STANDAR PENGELOLAAN	Struktur organisasi	32	29	0
48	STANDAR PENGELOLAAN	Uraian tugas	32	33	0
49	STANDAR PENGELOLAAN	Kerjasama kemitraan	32	10	22
50	STANDAR PENGELOLAAN	Jadwal kegiatan	32	33	0
51	STANDAR PENGELOLAAN	Jumlah kelompok belajar	32	28	4
52	STANDAR PENGELOLAAN	Kesinambungan program	32	11	21
53	STANDAR PENGELOLAAN	Keterlaksanaan supervisi	32	29	3
54	STANDAR PENGELOLAAN	Laporan supervisi	32	27	5
55	STANDAR PENGELOLAAN	Teknis supervisi	32	24	8
56	STANDAR PENGELOLAAN	Laporan kegiatan	32	33	0
57	STANDAR PENGELOLAAN	Laporan keuangan	32	32	0
58	STANDAR PENGELOLAAN	Kelengkapan laporan keuangan	32	30	2
59	STANDAR PENGELOLAAN	Pihak penerima laporan	32	7	25
60	STANDAR PEMBIAYAAN	Sumber dan jumlah dana	32	7	25
61	STANDAR PEMBIAYAAN	Penggunaan dana	32	22	10
62	STANDAR PEMBIAYAAN	Rencana pengembangan dana	32	28	4
63	STANDAR PEMBIAYAAN	Staf administrasi keuangan	32	31	1
64	STANDAR PEMBIAYAAN	Pola administrasi keuangan	32	32	0
65	STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN	Rencana penilaian	32	34	0
66	STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN	Keterlaksanaan kegiatan penilaian	32	32	0
67	STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN	Ujian Nasional	32	34	0
68	STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN	Evaluasi akhir program	32	34	0
69	STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN	Dokumen hasil penilaian	32	34	0

70	STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN	Data lulusan	32	33	0
71	STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN	Penghargaan kepada pendidik	32	18	14
72	STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN	Penghargaan kepada peserta didik	32	19	13
73	STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN	Penghargaan kepada tenaga kependidikan	32	17	15
74	STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN	Penerimaan penghargaan oleh program/ lembaga	32	20	12
75	STANDAR ISI	Peninjauan kurikulum	32	29	3
76	STANDAR PENGELOLAAN	Penentuan pimpinan PKBM	32	12	20

*Ket : data yang ditampilkan merupakan data yang sudah diverifikasi*

Pada tabel dengan list berwarna merah diperlukan perhatian khusus dari Dinas Pendidikan Kab/Kota, UPT BP PAUD dan Dikmas Banten, dan Ditjen PAUD dan Dikmas, serta pemangku kebijakan lainnya yang berkepentingan

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Kegiatan pemetaan mutu pada Lembaga Satuan dan/atau Program PAUD dan Dikmas tahun 2017 yang dilaksanakan oleh BP PAUD DAN DIKMAS Banten di wilayah kerja Provinsi Banten dapat berjalan dengan baik, dari awal kegiatan hingga tersusunya Buku Hasil Pemetaan Mutu ini walaupun terdapat beberapa hambatan akan tetapi dapat terlalui dengan baik dalam pelaksanaannya.

Buku hasil pemetaan mutu ini mencoba memetakan mutu satuan dan/atau program PAUD dan Dikmas dalam memenuhi 8 (delapan) standar nasional pendidikan sehingga pada tahap selanjutnya akan dilakukan pendampingan (supervisi) yang diarahkan untuk mengikuti akreditasi.

Adapun mutu yang telah kami petakan yakni pada lembaga PAUD, LKP dan PKBM. Dari pemetaan mutu yang dilaksanakan dapat disimpulkan bahwa secara umum untuk mutu kelembagaan/program lembaga satuan PAUD dan Dikmas di Provinsi Banten masuk dalam kategori belum memenuhi itu terlihat pada capaian hasil mutu lembaga satuan PAUD dan Dikmas berdasarkan hasil analisis pemetaan mutu tahun 2017 pada standar pembiayaan sebesar 63,39 %, pada standar PTK sebesar 67,62 %, dan pada standar sarana dan prasarana sebesar 57,81 % sehingga perlu disupervisi lebih lanjut.

Hasil dari pemetaan ini menjadi diharapkan menjadi pertimbangan dan masukan untuk Dinas Pendidikan Kab/Kota, BP-PAUD dan Dikmas Banten, dan Ditjen PAUD dan Dikmas Kemdkbud RI dalam hal 1) perencanaan, 2) pengendalian, dan 3) evaluasi mutu lembaga binaannya.

#### **B. Saran**

Kepada berbagai pihak yang berkepentingan dalam pendidikan nonformal khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab/Kota, BP PAUD dan Dikmas Banten, dan Ditjen PAUD dan Dikmas Kemdikbud RI, perlu memfasilitasi pelaksanaan delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada lembaga/program PAUD, PKBM, dan LKP sehingga bisa meningkatkan capaian mutu lembaga/program tersebut, utamanya lembaga yang capaian mutunya kurang dari 60,00 %.

Sedangkan kaitan dengan kegiatan pemetaan mutu yang akan datang, berikut rekomendasi dari BP PAUD dan Dikmas Banten :

- Komunikasi dan koordinasi yang baik antara petugas pemetaan mutu (Verifikator) Dinas Pendidikan Kab/Kota dengan BP PAUD dan Dikmas Banten agar permasalahan yang ada di lapangan dapat diatasi.
- Komunikasi dan koordinasi yang baik antara petugas pemetaan mutu (Verifikator) Dinas Pendidikan Kab/Kota dengan lembaga sasaran pemetaan mutu dalam pemenuhan berkas-berkas dalam pemenuhan masing-masing indikator.

- perlu adanya simulasi aplikasi perangkat pemetaan mutu kepada lembaga satuan PAUD dan Dikmas yang akan dipetakan mutunya, sehingga lembaga dapat lebih memahami aplikasi yang akan digunakan.

**BAB V**  
**PENUTUP**

Demikian laporan pemetaan mutu lembaga satuan PAUD dan Dikmas tahun 2017 ini dibuat, kepada Bapak Sekertaris Ditjen PAUD dan Dikmas semoga berkenan dan maklum adanya.

Serang, November 2017  
Penanggungjawab Kegiatan  
Kasi Program dan PSD

**Dede Harsudin, SE, M.Si**  
NIP 1972072007011010